

# *Ragam Perlawanan Perempuan Sulawesi*

*Melindungi dan Menjaga Hutan Hujan*

**Catatan Akhir Tahun 2025**  
*Regional Sulawesi*









# **Catatan Akhir Tahun 2025**

## *Regional Sulawesi*

**“Ragam Perlawanan Perempuan Sulawesi  
Melindungi dan Menjaga Hutan Hujan”**

**Penulis**

Zulfaningsih HS  
Fitra Wahyuni  
Elsa Ayu Friska  
Kusmawaty Matara  
Siti Aminah

**Editor**

Slamet Riadi

**Layout**

Fitra Yusri

**Diterbitkan oleh**

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan  
Jalan Aroepala, Kompleks Permata Hijau Lestari, Blok Q1 No.8, Makassar  
Indonesia  
+628229 393 9591  
+62411 467 1368  
[walhisulsel@gmail.com](mailto:walhisulsel@gmail.com)  
[www.walhisulsel.or.id](http://www.walhisulsel.or.id)

# CATATAN

## *Pembuka*

Di ujung tahun 2025, Sulawesi masih dihiasi oleh narasi “hijau”: peta investasi nikel yang terus meluas, smelter yang menjulang di berbagai wilayah, serta janji transisi energi yang diklaim akan menyelamatkan bumi. Namun, dibalik retorika pembangunan berkelanjutan tersebut, terbentang realitas lain yang jauh dari hijau. Hutan hujan terus digunduli, sungai-sungai berubah warna dan tercemar, sementara desa-desa terbelah oleh konflik lahan dan perebutan air akibat ekspansi industri ekstraktif.

Dampak paling keras dari krisis ini tidak terasa di ruang rapat kementerian atau laporan keberlanjutan korporasi, melainkan di ruang-ruang domestik yang sunyi: dapur-dapur kecil di kaki bukit dan wilayah pesisir Sulawesi. Di sanalah perempuan petani, perempuan adat, dan ibu rumah tangga menjadi korban pertama dari apa yang selama ini disebut sebagai “kutukan sumber daya alam”. Istilah ini tidak sekadar menunjuk pada kerusakan ekologis, tetapi pada rangkaian ketidakadilan struktural yang membuat wilayah kaya sumber daya justru miskin perlindungan, dan kelompok paling rentan, perempuan menjadi pihak yang paling awal dan paling dalam menanggung dampaknya.

Menurut The Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia), hingga awal Agustus 2025 tercatat 17.355 kasus kekerasan, dengan 14.919 korban atau sekitar 80,6 persen adalah perempuan.<sup>1</sup> Sementara itu, Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2024 yang dirilis melalui siaran pers tahun 2025 mencatat 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan 330.097 diantaranya merupakan kekerasan berbasis gender, meningkat 14,17 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dalam lima tahun terakhir, Komnas Perempuan juga mencatat sedikitnya 80 kasus yang menunjukkan meningkatnya kerentanan perempuan akibat konflik sumber daya alam, konflik agraria, dan praktik penggusuran.<sup>2</sup>

Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan, terutama yang hidup di wilayah dengan tekanan lingkungan seperti perampasan lahan dan eksplorasi sumber daya alam—menghadapi risiko yang berlapis. Kerentanan ini paling kuat dialami oleh perempuan adat, perempuan pesisir, serta perempuan yang tinggal di wilayah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Mereka kehilangan ruang hidup dan sumber penghidupan, mengalami diskriminasi, kekerasan fisik dan psikis, bahkan tidak jarang menjadi korban kriminalisasi.<sup>3</sup>

Di Sulawesi, apa yang sering disebut sebagai “kutukan sumber daya alam” tidak hanya tampak pada hutan yang gundul atau sungai yang keruh, melainkan juga pada bagaimana dampak kerusakan tersebut paling dalam dirasakan oleh perempuan—sebagai ibu, pencari nafkah, dan penjaga kehidupan sehari-hari di tingkat rumah tangga. Kerusakan lingkungan menggerus fondasi kehidupan yang selama ini mereka rawat dan kelola.

<sup>1</sup> 14.000+ Kasus Kekerasan di 2025, Sudahkah Perempuan Indonesia Merdeka?

<sup>2</sup> Siaran Pers Komnas Perempuan Memperingati Hari Lingkungan Hidup 2025

<sup>3</sup> *ibid.*

<sup>4</sup> Di Mana Ada Tambang Nikel, Di Situ Perempuan Jadi Korban

Di Torobulu, Konawe Selatan (Sulawesi Tenggara), perempuan petani kehilangan akses ekonomi akibat lahan garapannya tercemar limbah tambang. Padi menguning, tidak berbuah, dan berujung pada gagal panen, memutus sumber penghidupan yang selama ini menopang kehidupan keluarganya.<sup>4</sup> Sementara itu, di Morowali Utara (Sulawesi Tengah), perempuan tidak lagi dapat mencari kerang sungai karena sungai telah tercemar dan rusak akibat aktivitas tambang dan smelter nikel. Kondisi ini memaksa mereka beralih profesi menjadi penjual makanan dengan pendapatan yang jauh lebih tidak pasti.<sup>5</sup>

Ancaman serupa terjadi di Pulau Kabaena dan Pulau Wawonii, dimana praktik ekspansi pertambangan menggerus ruang hidup dan menurunkan hasil tangkapan nelayan. Sementara itu, perempuan di Mambu Tapua (Polewali Mandar) dan kawasan hutan Nantu (Gorontalo) mempertahankan kebun, hutan, dan air dari tekanan ekspansi perkebunan dan tambang. Rencana perusakan dua pertiga hutan dan ladang merica di Loeha Raya, Luwu Timur, seluas sekitar 17.000 hektar mengancam sumber kehidupan dan identitas mereka.<sup>6</sup>

Pengalaman-pengalaman tersebut menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan; mulai dari polusi, deforestasi, eksploitasi sumber daya alam, hingga cuaca ekstrem memicu rangkaian krisis lanjutan, seperti bencana ekologis, pengungsian, krisis pangan, kelangkaan air, dan ketidakstabilan ekonomi. Dalam masyarakat dengan ketimpangan gender yang mengakar kuat, kondisi ini menjadi faktor pendorong meningkatnya kekerasan berbasis gender yang berlapis. Ketidaksetaraan gender dan kekerasan berbasis gender (GBV) tidak dapat dipisahkan dari persoalan lingkungan.

Namun justru di tengah kehancuran itulah, perempuan tampil sebagai penjaga terakhir hutan hujan Sulawesi. Bukan karena mereka ingin disebut pahlawan, melainkan karena mereka memahami dengan sangat konkret apa arti runtuhnya hutan: tidak ada lagi air untuk memasak dan minum, tidak ada lagi tanah untuk menanam, dan tidak ada lagi jaminan masa depan bagi anak-anak mereka.

Catatan Akhir Tahun 2025 bukan sekadar rangkuman angka, peta konsesi, atau daftar izin yang terus bertambah. Ia adalah catatan tentang perempuan yang, meski dihimpit oleh kekuasaan korporasi, negara, dan narasi “pembangunan”, tetap berdiri di barisan depan. Perempuan yang menolak tambang, mempertahankan hutan adat, dan menjaga hutan hujan sebagai ruang hidup—bukan sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan.

Dalam perspektif ekofeminisme, perjuangan ini merupakan perlawanan terhadap androsentrisme dan kapitalisme ekstraktif yang secara bersamaan menggunduli alam dan menindas perempuan. Di Sulawesi, melindungi hutan hujan bukan semata upaya menyelamatkan pohon dan satwa, melainkan perjuangan atas keadilan ekologis dan keadilan gender: atas ruang hidup perempuan, kedaulatan atas tanah dan air, serta hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri.

\*\*\*

## Catatan Akhir Tahun 2025

*Regional Sulawesi*

<sup>4</sup> [Di Mana Ada Tambang Nikel, Di Situ Perempuan Jadi Korban](#)

<sup>5</sup> [Dampak Nikel dalam Kehidupan Perempuan di Lingkar Smelter Nikel Morowali](#) APER

<sup>6</sup> [Perempuan-perempuan tangguh Sulawesi menentang pertambangan nikel - Selamatkan Hutan Hujan](#)



Dok: Danau Towuti dengan latar pegunungan di kawasan Lumereo/WALHI Sulawesi Selatan

**Catatan Akhir Tahun 2025**

*Regional Sulawesi*

# Kami Menjaga Ruang Hidup Sebab di Sanalah Kehidupan Kami *Bertumbuh*

Penulis: Zulfaningsih HS

Loeha Raya bukan sekadar nama wilayah. Ia adalah ingatan kolektif tentang ruang hidup sebelum peta administratif memecahnya secara bertahap menjadi lima desa: Rante Angin, Bantilang, Tokalimbo, Masiku, dan Loeha. Meski secara administratif terpisah, kelima desa ini masih terikat oleh satu lanskap ekologis dan sejarah yang sama yaitu ruang hidup yang berada di sebelah timur Danau Towuti, danau purba terbesar kedua di Indonesia, yang menjadi jantung ekosistem Kecamatan Towuti, Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

Di kawasan inilah hutan hujan Sulawesi Selatan yang berada dalam lanskap pegunungan lumereo. Pegunungan Lumereo bukan hanya lanskap geografis, tapi juga ruang hidup kolektif: sumber air bagi puluhan mata air dan sungai yang bermuara ke Danau Towuti (yang berstatus kawasan konservasi), tempat tumbuhnya pohon-pohon besar dan flora endemik Sulawesi, serta habitat bagi satwa-satwa khas. Menurut data BPS, Sensus Penduduk Kecamatan Towuti (2024) jumlah penduduk laki-laki sebanyak 26.831 jiwa dan perempuan sebanyak 23.774.<sup>7</sup> Hampir seluruhnya menggantungkan hidup dari hasil alam Pegunungan Lumereo yang termasuk dalam konsesi PT Vale dinamakan Blok Tanamalia.

Namun, sejak beberapa tahun terakhir, Pegunungan Lumereo menjadi medan konflik besar karena rencana perluasan tambang nikel PT Vale Indonesia di Blok Tanamalia. Aktivitas eksplorasi dan potensi eksploitasi tambang di kawasan ini mengancam sekitar ±90 persen masyarakat bekerja sebagai petani merica. Total luasan kebun merica mencapai 4.239,8 hektare. Dengan rata-rata 1.850 pohon per hektar, jumlah total pohon merica di Blok Tanamalia mencapai sekitar 7.989.798 pohon.<sup>8</sup> Padahal para petani merica telah merasakan kesejahteraan dari bertani merica, bukan dari pertambangan nikel.

Setiap pohon menghasilkan rata-rata 3 kilogram merica per musim panen. Dengan harga jual sekitar Rp116.000 per kilogram (2025), maka dalam satu musim panen, petani dan buruh tani menghasilkan nilai ekonomi sekitar Rp 926.816.568.000 (Sembilan ratus dua puluh enam miliar rupiah lebih). Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi nyata dari kesejahteraan yang dihasilkan dari kebun, sekaligus acuan kerugian materiil yang akan dialami petani, buruh tani, dan seluruh rantai ekonomi lokal apabila tambang beroperasi.

Dalam pengelolaan kebun, petani tidak bekerja sendiri. Mereka dibantu oleh buruh tani, pedagang lokal, hingga jaringan distribusi sederhana yang menghidupi banyak keluarga. Dengan kata lain, merica bukan hanya komoditas, tetapi fondasi ekonomi kolektif masyarakat Loeha Raya—sesuatu yang tidak pernah mereka peroleh dari industri tambang nikel.

Dok: Buruh tani perempuan memetik merica sebagai bagian dari aktivitas pertanian sehari-hari/Istimewa



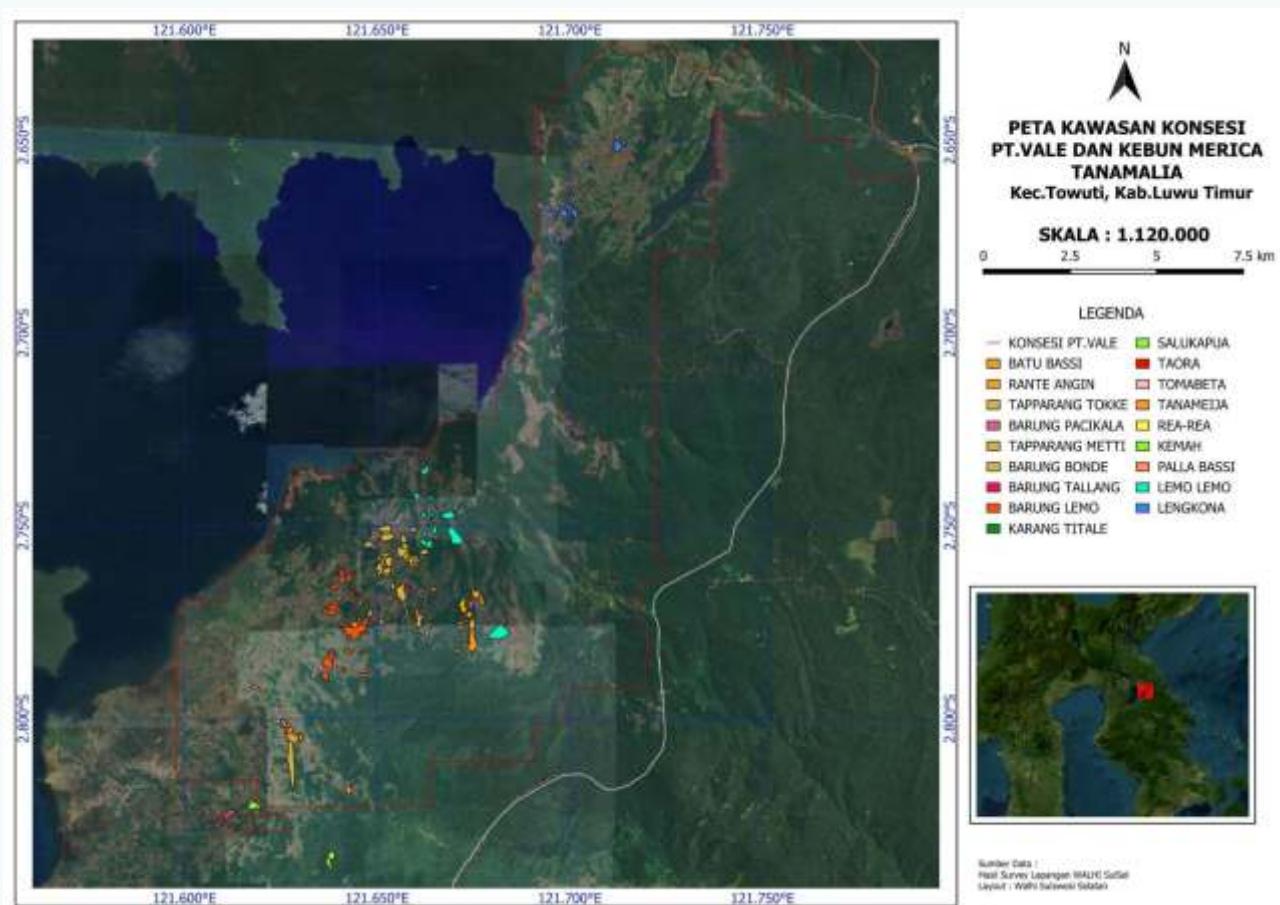
<sup>7</sup>Kecamatan Towuti Dalam Angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur

<sup>8</sup>Laporan Hasil Riset 'Lumbung Merica Nusantara Di Tengah Perluasan Pertambangan Nikel: Etnografi Perkebunan & Valuasi Ekonomi Kawasan Tanamalia, Luwu Timur, Sulawesi Selatan' - WALHI Sulsel

## Masuknya PT. Vale dan Awal Konflik Terbuka

Awal tahun 2022, PT Vale Indonesia mulai memasuki kebun masyarakat di Dusun Lemo-lemo, Desa Loeha, untuk membangun camp dan memulai aktivitas eksplorasi. Sejak saat itu, konflik tidak lagi bersifat laten—ia menjadi nyata, kasat mata, dan menghantam kehidupan sehari-hari warga.

Sepanjang tahun 2022, perusahaan gencar melakukan sosialisasi, namun dilakukan secara elitis dan manipulatif: dilaksanakan di luar wilayah konsesi, hanya mengundang lima perwakilan warga dan satu kepala desa, lalu dijadikan klaim persetujuan masyarakat. Di saat yang sama, intervensi aktor politik muncul secara massif, mendorong masyarakat agar menerima tambang dengan dalih pembangunan dan kepentingan nasional.



Dok: Peta Konsesi PT. Vale Indonesia dan Kebun Merica milik masyarakat 2025/WALHI Sulawesi Selatan

Bagi perempuan, dampaknya tidak berhenti pada hilangnya kebun. Aktivitas eksplorasi memicu depresi dan ketakutan, terutama akan kehilangan wilayah kelola dan potensi bencana ekologis akibat kerusakan hutan. Konflik sosial pun merebak—antara warga yang menolak dan yang mendukung tambang—diperparah oleh intimidasi aparat keamanan dan pihak perusahaan, termasuk mendatangi rumah-rumah warga untuk melemahkan gerakan perempuan. Isu kepemilikan lahan sengaja dimainkan untuk memecah solidaritas.

Dalam situasi inilah perempuan dari Rante Angin, Loeha, Masiku, Bantilang, dan Tokalimbo mulai membangun konsolidasi. Ruang-ruang pertemuan kecil menjadi tempat berbagi ketakutan, kemarahan, dan kesadaran bersama bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan sekaligus paling terdampak.

Dari konsolidasi ini, mereka menyepakati pembentukan sebuah kelompok kolektif bernama Pejuang Perempuan Loeha Raya. Diskusi-diskusi yang berlangsung tidak hanya membahas kerusakan lingkungan, tetapi juga membaca korporasi sebagai aktor perusak dan negara sebagai pemberi legitimasi bagi tambang nikel. Perempuan mulai menganalisis bagaimana tubuh, kerja reproduktif, dan penghidupan mereka dikorbankan atas nama pembangunan.

<sup>4</sup> Di Mana Ada Tambang Nikel, Di Situ Perempuan Jadi Korban

<sup>5</sup> Dampak Nikel dalam Kehidupan Perempuan di Lingkar Smelter Nikel Morowali AEER

<sup>6</sup> Perempuan-perempuan tangguh Sulawesi menentang pertambangan nikel - Selamatkan Hutan Hujan

Tahun 2023 menjadi titik penting kebangkitan perlawanan perempuan. Kesadaran itu muncul ketika mereka mengetahui bahwa kebun, tanah dan hutan yang selama ini mereka rawat masuk dalam wilayah konsesi tambang. Salah satu suara yang menguat dari proses ini adalah Hasmah Kaso, perempuan petani dan Ketua Pejuang Perempuan Loeha Raya. Baginya, organisasi perempuan adalah kebutuhan mendesak.

***“Penting sekali organisasi perempuan, karena di situlah kami para perempuan ikut juga memperjuangkan hak-hak kami. Bukan hanya laki-laki saja. Asal kalian tahu saja, kami perempuan yang paling terkena dampak aktivitas pertambangan.”***

Bagi Hasmah, masuknya tambang bukan hanya soal lingkungan, tetapi soal perampasan hidup:

***“Paling parah, PT Vale masuk menambang, merampas hasil pencaharian suami kami.”***

Organisasi ini, menurutnya, menjadi ruang aman bagi perempuan untuk berkumpul, belajar, dan saling menguatkan.

***“Kami membentuk organisasi ini supaya ada tempat kami para perempuan berkumpul, berbagi cerita, bahkan belajar memperjuangkan hak asasi kami. Paling penting, kami membantu suami, kakak, atau orang tua kami memperjuangkan hak atas tanah. Karena masyarakat Loeha Raya hanya hidup sebagai petani lada. Kami mau menjaga kebun kami.”***

Nurhasiah, salah satu anggota Pejuang Perempuan Loeha Raya, mengingat dengan jelas momen awal kesadarannya:

***“Pertama kali sadar itu waktu eksplorasi masuk, Februari 2023. Setelah itu kami demo bulan Juni 2023. Dan perjuangan kami sampai hari ini belum berhenti.”***

Baginya, alasan perempuan berjuang sangat sederhana namun fundamental:

***“Alasannya cuma satu: ini hak kami. Apa yang mau dimakan anak-cucu kami ke depan?”***

Ia menambahkan dengan suara yang menolak tunduk:

***“Saya bergerak karena saya pikir, orang luar mau ambil tanah kami. Kalau tanah kami diambil, di mana kami hidup? Isi perut kami mau digusur, kami tidak rela.”***



Dok: Pertemuan perempuan sebagai ruang belajar bersama/WALHI Sulawesi Selatan

Perjuangan perempuan Loeha Raya tidak berhenti di ruang-ruang diskusi desa atau bentangan spanduk penolakan di kebun merica. Ketika suara mereka terus dipinggirkan di tingkat lokal, perempuan-perempuan ini memilih melangkah lebih jauh: mendatangi pusat kekuasaan. Pada awal Oktober 2023, mereka meninggalkan kebun, rumah, dan tanggung jawab domestik yang selama ini melekat, untuk datang ke Jakarta—sebuah langkah politik yang tidak ringan bagi perempuan petani. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa perjuangan menjaga hutan dan ruang hidup tidak mengenal batas geografis; ia bergerak dari kampung hingga ibu kota, dari ladang merica hingga lorong-lorong kementerian.

Selama 2–5 Oktober 2023, perwakilan petani dan perempuan Loeha Raya bersama WALHI Sulawesi Selatan mendatangi kementerian dan lembaga negara: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian ESDM, Komnas Perempuan, hingga berupaya menemui Presiden Joko Widodo. Mereka datang bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai warga negara yang menuntut keadilan. Di hadapan pejabat negara, perempuan Loeha Raya menyampaikan kenyataan pahit yang jarang masuk dalam laporan resmi: bahwa tambang nikel PT Vale di Tanamalia mengancam sumber penghidupan mereka sebagai petani merica, membuka jalan bagi penggusuran, memperbesar risiko pelanggaran HAM, serta menjerumuskan perempuan dan anak-anak ke dalam jurang kemiskinan struktural.

Langkah mereka bahkan melampaui kementerian. Perempuan Loeha Raya mendatangi kantor lembaga keuangan dan perwakilan negara asing yang menanamkan modal pada PT Vale, menegaskan bahwa investasi yang mengabaikan hak rakyat bukanlah pembangunan, melainkan perampasan yang dilegalkan.

Dalam pernyataan sikap yang mereka bawa ke Jakarta, perempuan dan petani Loeha Raya menyusun tuntutan yang jelas dan tidak bisa ditawar: penghapusan konsesi tambang PT Vale di Tanamalia yang tumpang tindih dengan kebun merica masyarakat; pelarangan eksplorasi dan ekspansi tambang di wilayah tersebut; pelaksanaan konsultasi publik yang memisahkan ruang suara perempuan agar pengalaman dan kerentanan mereka tidak lagi disamarkan atas nama “persetujuan masyarakat”; serta jaminan atas hak masyarakat terhadap tanah dan sumber daya alam, termasuk penghentian segala bentuk intimidasi dan pelanggaran HAM.



Dok: Perempuan dan petani mendatangi kementerian dan lembaga negara di Jakarta (2023)/WALHI Sulawesi Selatan

## 2025: Ancaman Baru di Tanamalia

Meski aktivitas PT Vale Indonesia di Blok Tanamalia dikabarkan berhenti, bagi masyarakat ketiadaan kepastian justru menjadi ancaman yang tak pernah benar-benar usai. Hingga hari ini, tidak ada pernyataan tegas yang menyatakan bahwa perusahaan telah sepenuhnya angkat kaki dari wilayah Loeha Raya dengan ketidakjelasan status lahan dan tumpang tindih klaim.

***“Kami masih ragu,” ujar Hasmah Kaso, “karena tidak ada titik terang soal lahan kami antara masyarakat dan PT Vale Indonesia.”***

Alih-alih mereda, tahun 2025 justru menghadirkan ancaman baru. Pada 14 November, muncul rencana calon lokasi persiapan pembangunan markas Batalyon TNI AD di Tanamalia. Lokasi yang dipatok diketahui berada di atas kebun masyarakat—ruang hidup yang selama ini menjadi sumber pangan, penghidupan, dan identitas sosial warga. Bagi perempuan Loeha Raya, kebun bukan sekadar tanah, tetapi ruang produksi kehidupan.



Dok: Foto Pemasangan Patok dan Spanduk di atas Kebun Merica masyarakat/Masyarakat Loeha Raya

***“Kalau itu terjadi,” tegas Hasmah Kaso, “sama saja dengan merampas hak masyarakat. Itu akan memicu konflik berkepanjangan.”*** Ketika ruang hidup diperlakukan sebagai objek kekuasaan, maka yang hilang bukan hanya lahan, tetapi juga rasa aman dan keadilan sosial.

Ironisnya, institusi yang sejatinya memiliki mandat melindungi warga negara justru dipersepsi menghadirkan ketakutan baru. TNI, yang secara konstitusional bertugas menjaga rakyat, dalam konteks ini dipandang berpotensi menambah tekanan dan intimidasi bagi masyarakat sipil, khususnya perempuan.

Meski belakangan dikabarkan bahwa lokasi rencana pembangunan batalyon tersebut dipindahkan akibat aksi penolakan masyarakat yang masif, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah maupun TNI AD. Ketidakjelasan ini kembali menegaskan pola lama: keputusan sepihak, minim transparansi, dan pengabaian terhadap suara warga.



Dok: Konsesi PT Vale, kebun merica warga, dan rencana pembangunan Batalyon TNI AD dalam satu bentang wilayah/WALHI Sulawesi Selatan

## Perempuan sebagai Penjaga Hutan dan Ruang Hidup

Pengamatan mendalam yang dilakukan perempuan Loeha Raya lahir dari relasi hidup mereka yang sangat erat dengan lingkungan. Pernyataan-pernyataan yang disampaikan bukan asumsi, melainkan refleksi dari pengalaman sehari-hari sebagai perempuan petani yang menggantungkan hidup pada kebun, hutan, dan air. Namun relasi dan pengetahuan perempuan ini sama sekali tidak dipertimbangkan oleh PT Vale Indonesia. Dalam proses eksplorasi di Blok Tanamalia, perusahaan tidak menerapkan analisis berbasis gender, sehingga dampak spesifik yang akan dialami perempuan tidak pernah dibicarakan secara terbuka, partisipatif, dan bermakna.

Berdasarkan pengamatan langsung dan rangkaian diskusi kolektif, perempuan Loeha Raya secara tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pertambangan nikel di Blok Tanamalia. Mereka menemukan bahwa tambang bukan membawa kesejahteraan, melainkan menghadirkan bencana ekologis multisektoral yang secara langsung menghantam kehidupan perempuan, baik di ranah publik maupun privat. Kerusakan lingkungan, hilangnya kebun, meningkatnya konflik sosial, hingga tekanan psikologis adalah beban berlapis yang harus ditanggung perempuan ketika ruang hidup mereka dijadikan zona ekstraksi.

Bagi Pejuang Perempuan Loeha Raya, perjuangan ini melampaui sekadar penolakan tambang. Ini adalah upaya mempertahankan kedaulatan atas ruang hidup. Dengan kesadaran atas dampak dan kerentanan yang akan mereka hadapi, perempuan petani membangun pengorganisiran melalui penyadaran persuasif, pertemuan rutin, dan diskusi kritis untuk membaca setiap langkah yang dihadapi.

Dok: Foto Aksi Penolakan Masyarakat terhadap ekspansi PT. Vale Indonesia 2023/WALHI Sulawesi Selatan





Dok: Forest Watch Indonesia



**Catatan Akhir Tahun 2025**  
*Regional Sulawesi*

# *Perempuan Penjaga Hutan* **Di Desa Mambu Tapua Kec. Matangnga** **Kab. Polewali Mandara Prov. Sulbar**

Penulis: Siti Aminah

Proses Pembangunan dan Pengelolaan kekayaan alam yang sering kebanyakan orang kaitkan dan agungkan dengan melimpahnya sumber daya alam, seringkali tidak menampakkan hasilnya yang dapat dirasakan langsung oleh Masyarakat. Keuntungannya hanya berputar pada pengelola dan penguasa kebijakan, yang tampaknya mereka sengaja melupakan bahwa hal tersebut didapatkan dari hasil tercerabutnya hak hidup Masyarakat dan menutup peran Perempuan. Mereka sepertinya buta bahwa kekayaan dan keberhasilan Pembangunan tersebut merupakan hasil dari perampasan tanah dan lahan serta juga eksplorasi alam.

Mereka juga sepertinya abai bahwa Perempuan dan alam mempunyai keterkaitan yang sangat erat. Sehingga penting adanya kesadaran bahwa eksplorasi dan perusakan lingkungan Adalah isu yang mempunyai irisan dengan logika penindasan warga khususnya Perempuan. Selain itu, penting juga untuk mengangkat Pengalaman konkret kebutuhan Perempuan dalam menghadapi kerusakan lingkungan utamanya Hutan. Sangatlah Penting membincang bagaimana akses dan hak Perempuan atas alam yang optimal.

Hal ini perlu dilakukan sebab dengan pendekatan pengalaman Masyarakat khususnya kaum Perempuan, kita bisa mengetahui mengapa setiap kerusakan yang terjadi pada alam itu mempunyai jalinan dengan tercerabutnya hak hidup Perempuan, keterbatasan Perempuan dalam mengakses Informasi untuk melibatkan diri hingga dilibatkan dalam pengambilan kebijakan lingkungan adalah salah satu permasalahan yang akan dan terus menindas Perempuan. Mungkin masih banyak orang diluar sana yang belum memahami dengan baik atau memang bermasalah dengan kenyataan bahwa lingkungan dan Perempuan itu saling berkaitan satu sama lain.

## Perempuan Sebagai Pengelola Hutan

Salah satu Warga Desa Mambu Tapua Kec. Matangnga Kab. Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat, Ibu Hadina Hasan telah melakukan sebuah Upaya untuk menjawab bagaimana keterkaitan Perempuan mengelola dan menjaga Hutan dengan kemampuan yang dimiliki. Karena Hutan merupakan sumber kehidupan, terlebih bagi Perempuan. Perempuan paling utama terdampak kalau hutan rusak. Para Perempuan di daerah ini menjaga sekaligus mengelola hutan jadi sumber penghidupan dan pengetahuan, Ibu Hadina Hasan juga adalah Ketua Kelompok Wanita Tani (KWT) yang peduli lingkungan, dia merupakan satu-satunya Perempuan yang sangat aktif di Desa Mambu tapua Kec. Matangnga Kab. Polewali Mandar yang melakukan pengelolaan sumber daya Alam Hutan. Adapun tempat bermukim Ibu Hadina Hasan Adalah masuk dalam Kawasan Hutan Lindung dan telah ada kelompok Tani Hutan yang mendapat Izin Pengelolaan dari Kementerian Kehutanan. Namun Ibu Hadina Hasan tidak masuk dalam Kelompok Tani Hutan.

“Apa yang kami lakukan selama ini telah memperlihatkan bahwa perempuan mampu mengambil peran dalam pengelolaan hasil hutan dan pelestarian hutan. Maka sebaiknya dalam perencanaan hingga merumuskan suatu kebijakan mengenai pelestarian hutan kedepan , perempuan juga bisa dilibatkan secara menyeluruh” Harapan Ibu Rumah Tangga ini.

Cara Ibu Hadina Hasan dalam menjaga hutan adalah melakukan edukasi kepada warga utamanya Perempuan yang ada di desanya untuk bisa melestarikan Hutan sebagai sumber penghidupan yang selama masih bisa dinikmati dengan baik. Inilah salah satu yang memicu lambat laun adanya kesadaran kolektif Perempuan dan warga Desa Mambu Tapua untuk melestarikan dan menjaga hutan di Kawasan Hutan Lindung di sekitar tempat tinggal mereka. Menurutnya Hutan telah menjadi sumber Penghidupan dan Pengetahuan warga selama ini. Jika Hutan sudah rusak, maka dampak negatifnya sangat fatal dan Perempuan paling utama yang akan merasakan akibat tersebut.



Dok: Kegiatan saat Ibu Hadina Hasan melakukan Edukasi terhadap Perempuan yang bermukim di Pinggiran Hutan Desa mambu tapua Kabupaten Polewali Mandar (Juni 2023)

Perempuan secara langsung mempunyai Peran dalam Pengelolaan sumber daya alam dan sebagai penumbuhan taraf ekonomi keluarga serta mengurangi tanggungan kepala keluarga. Selain berperan pada hal rumah tangga, Perempuan biasanya bertindak untuk memperoleh pemasukan lainnya , maka dalam hal itu Perempuan sering mempunyai peran ganda dalam keluarga. Mengenai Partisipasi Perempuan masih sering ditemukan adanya hambatan untuk terlibat menjadi pengelola hutan atau sumber daya alam.

Keterlibatan dalam berbagai kontribusi kehutanan pada skala besar masih tergolong sangat kurang. Gambaran terhadap kontribusi Perempuan dalam pengelolaan Hutan yang tepat masih susah diperoleh. Hal ini menandakan bahwa keterlibatan Perempuan pada pengelolaan hutan masih sangat rendah dibandingkan laki-laki meskipun keduanya sama-sama mempunyai peran dalam pemanfaatan sumberdaya hutan.

Pada umumnya Perempuan diposisikan sebagai pemeran utama dalam komponen Pertanian dan kehutanan melalui pengelolaan sistem produksi berbagai sumber daya alam yang baik dan bagaimana cara melestarikannya demi keberlangsungan generasi berikutnya. Perempuan Adalah kunci untuk pengelolaan sistem lingkungan karena mampu berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga serta memiliki pengaruh penting pada sumber daya hutan. Akses dan kontrol sumber daya alam seperti tanah, air, hutan, dan vegetasi sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup Perempuan dan rumah tangga.

Perempuan yang memiliki akses lahan hutan harus bertanggung jawab dan ikut berpartisipasi secara efektif biasa disebut dengan preferensi sosial . Perempuan dengan Pendidikan yang lebih rendah, umumnya cenderung tidak didengar atau dianggap tidak wajar pendapatnya sehingga Perempuan kadang bekerja sendiri dengan kapasitas diri yang dimiliki.

Peningkatan Produktivitas tenaga kerja Perempuan tani hutan memiliki Peran dan Potensi yang strategis dalam mendukung peningkatan Pendapatan rumah tangga yang tergantung pada sumber daya hutan di sekitarnya. Semakin banyak Perempuan yang bekerja, menyebabkan kemungkinan besar peningkatan dalam pendapatan keluarga. Penambahan Pendapatan merupakan kontribusi dan sumbangan Perempuan yang dapat digunakan sebagai peningkatan kesejahteraan Keluarga.

Pendapatan Keluarga dapat dilihat dari berbagai Sektor, salah satunya dalam sektor kehutanan dilihat dari berbagai Produk hasil hutan yang dikelola oleh Petani Hutan seperti Kayu, Lili, Madu, makanan ternak, hewan, obat-obatan, buah-buahan dan sayuran.



Dok: Kegiatan Ibu Hadina Hasan saat mengajari masyarakat yang bermukim dihutan tentang Pengelolaan Air Nira Aren Menjadi Gula Semut ( 16 Juli 2023)

Pengambilan Keputusan Tentang Pengelolaan Sumber daya hutan tergantung pada partisipasi Perempuan tani hutan dan bagaimana interaksi yang terkait pada berbagai Tingkat dalam satu komunitas. Adanya Identifikasi terkait hal apa saja yang dapat meningkatkan interaksi dan memberdayakan Perempuan dalam Partisipasi Adalah dengan menganalisis interaksi pada Tingkat gender dan rumah tangga. Begitu pula dengan pemberian Ruang untuk mewujudkan aspirasi Perempuan terhadap lingkungannya dengan apa yang dapat mereka lakukan secara terukur dan bertanggung jawab seperti yang telah dilakukan selama ini oleh Ibu Hadina Hasan yang mencoba menjaga Kelestarian Hutan dengan cara mengelola Hasil Hutan Bukan Kayu, yakni mengelola pohon Aren menjadi sumber mata pencaharian. Produksi Air Nira merupakan potensi sumber daya alam yang mampu diolah dan hasilnya sangat menjanjikan. Saat ini Ibu Hadina Hasan telah membangun sebuah Usaha berupa pengelolaan Air Nira menjadi Gula Aren Kristal (Gula Semut).

Dia menceritakan bahwa pada awalnya Masyarakat menebang pohon-pohon yang ada dalam Kawasan Hutan, termasuk menebang Pohon Aren untuk membuka lahan perkebunan Jagung dan Lombok. Namun setelah Bu Hadina memberikan Pemahaman dan memperlihatkan hasil dari pengelolaan Arennya maka pohon aren yang ada di kawasan hutan saat ini mereka pelihara dengan baik dan melarang orang luar masuk menggarap lahan.



dok: Kondisi Hutan yang Gundul akibat petani ingin berkebun menanam Jagung dengan alasan bahwa jagung hasilnya cepat dibanding tanaman lain

***"Hutan sudah lama menjadi sumber penghidupan dan pengetahuan warga. itulah yang seharusnya merupakan modal kesadaran bersama agar menjaga kelestarian Hutan, termasuk membudidayakan pohon aren yang sangat menjanjikan hasilnya, karena setiap hari di panen atau diambil hasil airnya kemudian diolah. Berbeda dengan tanaman pohon hutan lainnya yang punya masa panen, bukan setiap hari "***kata Ibu Hadina Hasan.

Bahkan masyarakat sudah memprogramkan untuk melakukan budidaya bibit pohon Aren untuk ditanam di Lokasi yang ada agar Masyarakat yang bermukim di kawasan Hutan tidak lagi merusak hutan seperti menebang pohon untuk membuka lahan menanam tanaman atau berkebun Palawija terutama tanaman Jagung. Munculnya gerakan warga dalam menyadari peluang tersebut, dimulai sejak Tahun 2023 hingga saat ini di tahun 2025.

## Perempuan Sebagai Pengelola Hutan

Ada Sekitar 150 pohon Aren dipelihara oleh Masyarakat dan saat ini ada 60 pohon Aren yang sudah dijadikan sumber pengolahan gula aren semut yang dimanfaatkan oleh Masyarakat sekitar hutan untuk diolah. Pengolahan Gula Aren menjadi Gula Aren Kristal telah di Produksi oleh Kelompok Usaha Rumah Tangga Pimpinan Bu Hadina, dan Produk ini sudah dipasarkan ke Cafe-cafe melalui Usaha Rumah Kreatif YAPPER.



Dok: Ibu Hadina sedang memperlihatkan Pohon Aren selama ini dia Jaga bersama dengan Suaminya

Penghasilan setiap hari dari pengelolaan gula aren ini, dapat diestimasikan sebagai berikut : Jika setiap pohon aren dapat diambil airnya setiap pagi dan sore sebanyak 30 Liter, dari 30 liter tersebut menghasilkan 3 Kg Gula , maka Jumlah Keseluruhan Aren yang dihasilkan adalah :  $60 \times 3 = 180$  Kg/hari, harga Gula Aren Kristal ( Semut) Rp30.000,-. Jadi Penghasilannya setiap hari adalah sebesar Rp5.400.000/hari. setiap Petani minimal dia menyadap Aren 3 Pohon/ hari maka Penghasilannya adalah sebesar Rp. 270.000/hari. Demikian gambaran penghasilan dari pengelolaan aren tersebut



Dok: Hasil Pemeliharaan Pohon Aren telah menghasilkan Air nira aren yang diolah menjadi Produk Gula Aren Kristal ( Gula Semut)



**INVESTASI  
NOMOR SATU,  
SUARA  
PEREMPUAN  
MINTI DULU**

Dok: KIARA

Catatan Akhir Tahun 2025

*Regional Sulawesi*

# Perempuan Wawoni Melawan Tambang: Menjaga Tanah, Air, dan Masa Depan

Penulis: Elsa Ayu Friska

Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara bukan sekadar hamparan daratan yang dikelilingi laut biru. Ia adalah ruang hidup, sumber penghidupan, dan identitas bagi masyarakatnya. Di pulau kecil ini, tanah bukan hanya tempat berpijak, melainkan warisan leluhur yang menyatu dengan kebun, mata air, dan hutan. Ketika tambang datang dengan janji pembangunan dan kesejahteraan, justru perempuan Wawonii yang berdiri paling depan untuk mengatakan "tidak!". Bagi perempuan Wawonii, tanah dan air adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka berkebun, menanam umbi-umbian, merawat pohon kelapa, dan memastikan air bersih tetap mengalir untuk keluarga.

Kehadiran tambang mengancam semua itu, pembukaan lahan, pengerukan tanah, dan pencemaran air berisiko merusak sumber pangan dan kesehatan masyarakat. Karena itu, perlawanan perempuan bukan semata soal menolak tambang, tetapi tentang mempertahankan kehidupan. Perlawanan ini tumbuh dari kesadaran kolektif, Perempuan Wawonii menyadari bahwa jika tanah rusak, mereka yang pertama merasakan dampaknya, sulitnya mendapatkan air bersih, berkurangnya hasil kebun, hingga meningkatnya beban kerja domestik. Dari dapur dan kebun, suara perlawanan itu bergerak ke ruang public, Mereka berani menyuarakan penolakan, mengikuti aksi, dan menghadapi tekanan, meski sering kali dicap sebagai penghambat pembangunan.

Keberanian perempuan Wawonii mematahkan anggapan bahwa perempuan hanya berada di ruang domestik. Mereka menjadi penggerak komunitas, penjaga pengetahuan lokal, sekaligus pelindung lingkungan, dengan pengalaman hidup yang dekat dengan alam, mereka memahami bahwa kerusakan lingkungan bukan masalah jangka pendek, melainkan ancaman bagi generasi mendatang. Melawan tambang berarti menjaga agar anak-anak mereka kelak masih bisa hidup dari tanah yang sama.

Namun, perjuangan ini tidak mudah, Perempuan sering menghadapi intimidasi, kriminalisasi, dan stigma. Suara mereka kerap dianggap tidak penting, bahkan diabaikan dalam proses pengambilan keputusan. Meski demikian, perempuan Wawonii tetap bertahan, solidaritas antar sesama perempuan dan dukungan komunitas menjadi kekuatan utama untuk terus melawan. Perlawanan perempuan Wawonii juga menunjukkan bahwa pembangunan tidak boleh mengorbankan hak hidup masyarakat. Pembangunan sejati seharusnya menghormati lingkungan, mendengarkan suara warga, dan menjamin keberlanjutan. Ketika perempuan berdiri di garis depan melawan tambang, mereka sedang menawarkan perspektif lain tentang Pembangunan yang berakar pada keadilan ekologis dan sosial.

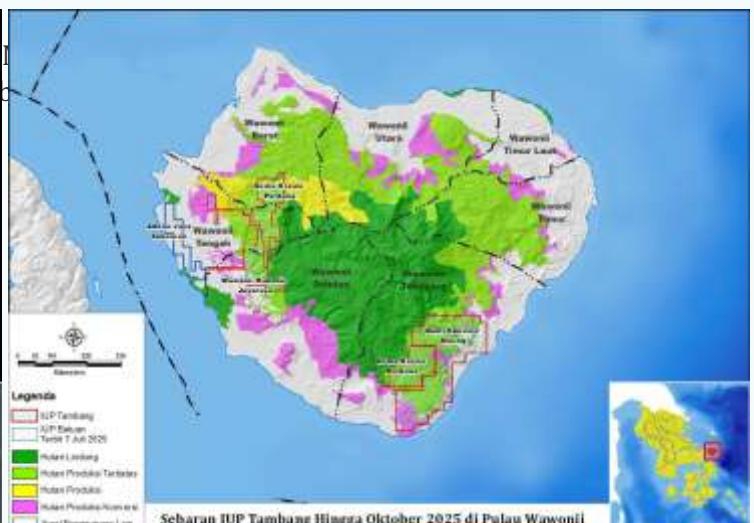
Kisah perempuan Wawonii adalah pengingat bahwa menjaga alam adalah tanggung jawab bersama. Dari pulau kecil di Sulawesi Tenggara, mereka mengirimkan pesan kuat: tanah, air, dan kehidupan tidak untuk ditukar dengan keuntungan sesaat. Selama ancaman terhadap ruang hidup masih ada, selama itu pula perempuan Wawonii akan terus berdiri, melawan, dan menjaga masa depan pulau mereka.

## Jejak Perlawanan Perempuan Menghadapi Ekspansi Tambang di Pulau Wawonii

Tambang di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, mulai memasuki tahap eksplorasi sekitar tahun 1990-an dan mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk nikel sejak tahun 2007, dengan aktivitas produksi yang kemudian berlanjut meskipun ada penolakan warga dan isu hukum terkait status pulau kecil berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil harusnya melindungi pulau wawonii dengan luasan hanya sekitar 867.58 km<sup>2</sup> dari ekspansi pertambangan. Tahun 2018-2025-an, aktivitas pertambangan nikel semakin masif, memicu konflik dengan masyarakat lokal yang ingin menjaga kelestarian alam dan mata pencaharian petani kopra, beberapa sungai yang menjadi tumpuan warga untuk mandi, mencuci, dan minum mulai berubah warna menjadi coklat kemerahan akibat sedimentasi. Yang paling terdampak ialah Perempuan.



sumber: Minerba One Map Indonesia (MOMI) ESDM



sumber: Minerba One Map Indonesia (MOMI) ESDM

Dampak dari aktivitas pertambangan yang masif tersebut menyebabkan kualitas air sungai yang menjadi tumpuan warga menurun drastis. Para perempuan melaporkan munculnya penyakit kulit (gatal-gatal) setelah mencuci atau mandi di sungai yang tercemar selain itu ancaman kontaminasi logam berat seperti kromium valensi enam ( $\text{Cr}^{6+}$ )<sup>9</sup> menjadi kekhawatiran besar. Paparan jangka panjang pada air yang tercemar tidak hanya berdampak pada kulit, tetapi juga risiko gangguan ginjal dan pencemaran bagi anggota keluarga, terutama anak-anak yang daya tahan tubuhnya lebih rentan.

Udara di sekitar area konsesi tambang di Wawonii kini sering kali pekat dengan debu. Mobilisasi truk pengangkut ore (bijih nikel) yang melintasi jalanan desa menciptakan polusi udara yang konstan, pengupasan lahan-lahan di perbukitan tidak hanya memicu banjir bandang, tetapi juga mengirimkan material sedimen ke laut. Hal ini merusak terumbu karang dan mengganggu ekosistem pesisir yang menjadi tempat para ibu mencari kerang atau ikan kecil (Meti-meti).

**Tanah adalah ibu, Air adalah Darah.** Dalam filosofi hidup masyarakat Wawonii, hubungan antara perempuan dan tanah bersifat sakral. Perempuan adalah pengelola utama urusan domestik yang sangat tergantung pada kelestarian alam. Saat perusahaan tambang mulai masuk ke wilayah seperti Desa Roko-Roko atau Mosolo, perempuanlah yang pertama kali merasakan dampaknya.

“Kalau gunung habis, dari mana air mengalir? kalau tanah kami dipagari, bagaimana cara kami memetik cengkeh?” Ibu Royani (45) adalah salah satu sosok sentral dalam perjuangan warga Desa Mosolo dan sekitarnya di Pulau Wawonii dalam menolak kehadiran tambang nikel oleh PT Gema Kreasi Perdana (GKP). Perjuangan Ibu Royani berakar pada kepemilikan tanah warisan keluarganya. Ia menolak keras penyerobotan lahan perkebunan Cengkeh dan Pala yang menjadi sumber nafkah utama keluarganya secara turun-temurun. Selain sebagai ibu rumah tangga, Ibu Royani sehari-hari bekerja sebagai petani Cengkeh dan Pala.



sumber : Istimewa

“ini kebunku saya rawat sendiri dari dulu. saya dapat warisan dari keluarga. saya setiap hari jalan kaki ke kebun, pulang sudah sore jalan kaki lagi. di kebunku saya tanami Cengkeh dan Pala. ada sekitar 300 pohon Cengkeh yang saya tanam. Tapi sekarang sudah habis di gusur sama tambang yang tidak bertanggung jawab”.ucap Ibu Royani.

Sebagai warga pulau kecil, ia menyadari bahwa pertambangan di Wawonii juga mengancam ketersediaan air bersih dan merusak ekosistem pesisir yang vital bagi kehidupan mereka.

**“Sebelum ada tambang, kami menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari hari seperti memasak, minum, mencuci dan mandi. Tapi, semenjak munculnya pertambangan di Pulau Wawonii, air tersebut sudah tidak bisa lagi kami gunakan karena warnanya yang sudah kecoklatan. kami sangat kesusahan air bersih” Ucap Ibu Royani.**

<sup>9</sup> Hasil Pengujian Lab.Produktivitas dan Lingkungan Perairan, Institut Pertanian Bogor 2025



sumber: Project Multatuli/Yuli Z

Perasaan takut menghantui Ibu Royani setiap kali menggunakan air yang diduga kuat tercemar itu. Tapi tak ada pilihan lain. Untuk kebutuhan minum, ia kadang mengambil air di sumur warga lain yang jaraknya jauh dari rumahnya dengan menggunakan motor untuk mengangkut air. Bahkan tidak jarang Ibu Royani membeli air galon untuk digunakan memasak.

***“saya takut soal kesehatan, biasanya setelah kita gunakan air tersebut pasti kita gatal-gatal. tapi mau bagaimana mi kasihan, kita mau mandi juga”*** Katanya.

Polusi udara dari pertambangan dapat berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan, termasuk risiko komplikasi kehamilan. Kecemasan akan dampak kesehatan inilah yang mendorong para perempuan Wawonii untuk berdiri menghalangi truk tambang. Suara-suara perempuan sering kali diabaikan dalam rapat-rapat resmi desa yang didominasi laki-laki. Namun, di lapangan mereka adalah benteng terakhir. Perempuan-perempuan Wawonii berdiri di depan alat berat, menghalangi laju excavator hanya dengan daster dan tangan kosong. Mereka tidak membawa senjata, mereka membawa keberanian yang lahir dari keputusan untuk melindungi ruang hidup.

Ibu-ibu di Wawonii sering mengeluhkan peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) pada anak-anak mereka. Batuk kronis dan sesak nafas menjadi pemandangan umum yang sebelumnya jarang terjadi sebelum tambang beroperasi secara masif.

***“bukan cuman masalah gatal-gatal, masalah sesak nafas juga ada. apalagi sama anak-anak dan ibu-ibu yang sudah tua. ini karena debu dari pertambangan. biar kita duduk di depan rumah, kita harus tutup hidung dan mulutnya kita. karena itu debu bertebaran apa lagi kalau mobil truk lalu lalang. banyak sekali debunya.”*** Kata Ibu Royani.

## **Hutan Sebagai Ruang Hidup, Sumber Pangan dan Identitas**

Narasi bahwa tambang akan membawa kesejahteraan sering kali menjadi mitos di mata para perempuan Wawonii. Alih-alih kaya, mereka justru terancam kehilangan kemandirian ekonomi. Perampasan kebun bukan sekedar kehilangan penghasilan. Ia adalah hilangnya kedaulatan perempuan atas ruang hidupnya. Ketika tanah tidak dapat mereka kelola, perempuan kehilangan ruang untuk mengambil keputusan atas pangan, benih, dan keberlangsungan hidup keluarga. Kebun yang selama ini menjadi sumber daya, pengetahuan dan identitas, berubah menjadi wilayah yang tertutup dan asing.

Kehilangan tanah juga berarti runtuhnya posisi tawar perempuan dalam keluarga dan komunitas. Kontribusi mereka yang sebelumnya nyata melalui hasil kebun, pengelolaan pangan menjadi tidak terlihat. Dalam kondisi ini, perempuan dipaksa bergantung pada pasar dan upah yang tidak pasti, sementara beban kerja justru bertambah.

Mereka harus membeli pangan yang sebelumnya ditanam sendiri, mencari pekerjaan informal dengan perlindungan minim, dan menanggung risiko ekonomi yang semakin besar. Perampasan kebun, dengan demikian, bukan hanya persoalan ekonomi, melainkan kekerasan struktural yang mencabut kemandirian, martabat, dan hak perempuan atas ruang hidupnya.

Beban perempuan tidak berhenti pada hilangnya kebun. Kerusakan sumber air memaksa mereka berjalan lebih jauh untuk mendapatkan air bersih, sementara kebutuhan rumah tangga tetap harus dipenuhi. Perempuan memikul beban berlapis: mengurus rumah, menjaga keluarga dari dampak lingkungan, sekaligus mencari sumber penghidupan baru di tengah keterbatasan. Lahan yang diklaim perusahaan tambang adalah kebun cengkeh, kelapa, mete dan pala yang telah menghidupi masyarakat secara turun-temurun. Bagi para ibu, kebun adalah "rekening bank" mereka. hasil panen digunakan untuk menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi, Ketika lahan dipagari atau digusur, sumber pendapatan tetap mereka hilang selamanya. Kerusakan alam memaksa perempuan mengeluarkan uang lebih banyak untuk kebutuhan yang gratis.

Hilangnya kebun juga berarti terputusnya warisan pengetahuan dan keberlanjutan antargenerasi. Anak-anak tidak lagi tumbuh dengan pengetahuan mengelola kebun, tetapi dengan bayang-bayang pekerjaan kasar tambang dan ketidakpastian ekonomi. Masa depan yang dahulu dibangun dari tanah kini digantikan oleh lubang-lubang tambang.

*“Dari hasil kebun, sangat membantu perekonomian keluarga. mulai dari makan, bangun rumah, beli kendaraan bahkan menyekolahkan anak pun kami bisa sampai S2 di luar kota. Itu semua dari hasil kebun. tapi semenjak kebun digusur, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun kami sudah kesusahan. Padahal kebun yang kami rawat sejak dulu itu warisan untuk anak cucu kami juga. tapi kalau sudah begini, apa yang mereka dapat nanti nya? hanya kesedihan karena mereka tidak punya warisan dari orang tua maupun neneknya. Itu semua karena tambang. tambang merebut kebahagian keluargaku”. Ucap Ibu Royani*

Ironisnya, ketika risiko sosial dan ekologis ditanggung oleh perempuan dan keluarga petani, keuntungan justru terakumulasi pada segelintir aktor di luar pulau. Tambang tidak menciptakan kesejahteraan lokal, melainkan memindahkan nilai ekonomi dari ruang hidup rakyat ke pusat-pusat modal.

Hilangnya kawasan hutan dan perubahan bentang alam sebagai akibat pertambangan yang dilakukan PT. GKP berdasarkan tangkapan Citra Satelit Sentinel 2A serta foto udara melalui drone dapat dilihat pada gambar berikut.



Tangkapan Citra Satelit (27-11-2021)



Tangkapan Citra Satelit (22-12-2022)



Tangkapan Citra Satelit (22-11-2023)



Tangkapan Citra Satelit (26-03-2024)



Tangkapan Citra Satelit (06-03-2025)



Foto Drone (29-09-2025) (Dok. Komdes Sultra)

## Melawan Kriminalisasi dengan Keteguhan

Perempuan Wawonii tidak tinggal diam. Mereka memilih keluar dari dapur menuju garis depan konflik dengan keberanian yang luar biasa. perempuan Wawonii lainnya sering menggunakan perlawanannya simbolis seperti berdiam diri, menangis hingga melakukan aksi blokade jalan tambang untuk menarik perhatian publik terhadap ketidakadilan yang mereka alami. Tak jarang para ibu berdiri di depan Excavator atau duduk di atas lahan mereka yang hendak digusur. Mereka menggunakan tubuh sebagai perisai, karena mereka tahu bahwa jika tanah itu hilang, mereka tidak punya tempat lagi untuk pulang.

Perjuangan ini bukan tanpa resiko. Para perempuan Wawonii harus berhadapan dengan tembok tebal kekuatan korporasi yang dikawal oleh aparat keamanan. Kriminalisasi menjadi senjata untuk membungkam mereka. Beberapa warga, termasuk perempuan, harus berurusan dengan panggilan polisi karena mempertahankan lahan milik mereka sendiri yang klaim secara sepah oleh perusahaan. alih-alih surut, intimidasi justru memperkuat solidaritas. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil di dapur dan di kebun, saling bertukar informasi, dan mengorganisir aksi protes. Mereka menyadari bahwa suara mereka adalah satu-satunya penghalang bagi kehancuran total pulau kecil mereka.



sumber: Istimewa/Gian Purnama

***"kalau lagi aksi, kita ibu-ibunya selalu di depan untuk melawan. Kita tidak takut. Karena yang kita perjuangkan haknya kita. Sebelum aksi, kita sudah janjian untuk berkumpul. Kita buat tulisan kata-kata yang menggambarkan perlawanannya dan menolak tambang". Ucap Ibu Royani.***

Perlawanannya ini juga membawa luka sosial yang mendalam. Masuknya tambang menciptakan polarisasi di tengah

masyarakat. Ada tetangga yang kini tak bertegur sapa karena perbedaan pilihan antara menerima kompensasi instan atau mempertahankan tanah. Yang berujung pada rasa tidak aman secara psikologis di lingkungan tempat tinggal sendiri.

*“Dulu sebelum ada tambang, hubungan keluarga maupun tetangga itu baik-baik saja. tapi semenjak ada tambang, hubungan itu sudah tidak baik. karena ada tetangga maupun keluarga yang mendukung tambang. mungkin karena ada keluarganya yang bekerja di tambang, jadi mereka tidak suka kalau kita menolak tambang. bahkan sampai kalau ada acara pun, biar keluarga kalau yang pesta tidak satu suara dengan dia, pasti dia tidak akan datang”. Ibu Royani.*

Perempuan memikul beban ganda di tengah konflik ini. Mereka harus memastikan kebutuhan dapur terpenuhi di tengah sumber air yang mulai keruh dan lahan yang kian sempit, sembari terus berjaga di lokasi konflik. Kelelahan fisik dan mental menjadi teman sehari-hari, namun “suara-suara yang tak bisa dibungkam” ini terus bergema, menolak untuk menyerah pada narasi pembangunan yang mengorbankan rakyat kecil.

## Jalur Hukum dan Politik

Para perempuan ini juga aktif dalam aksi-aksi massa di depan kantor pemerintahan di Kendari hingga Jakarta. Mereka menagih janji perlindungan hukum berdasarkan UU No. 27 Tahun 2007, pulau-pulau dengan luas dibawah 2.000 km<sup>2</sup> seperti Wawonii seharusnya tidak diperuntukkan bagi pertambangan. Argumen hukum ini terus diteriakkan oleh para perempuan ini di pengadilan, di jalan, hingga ke telinga para pemangku kebijakan di pusat. Warga termasuk keterlibatan perempuan di dalamnya, mengajukan berbagai gugatan pembatalan izin, seperti gugatan terhadap Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Hingga akhir 2025, MA terus menguatkan putusan bahwa Pulau Wawonii tidak diperuntukan bagi pertambangan karena statusnya sebagai pulau kecil yang dilindungi oleh Pada November 2025, MA menolak permohonan PK dari perusahaan nikel, sebuah kemenangan yang didorong oleh konsistensi warga (termasuk para ibu) dalam mengawal kasus ini selama bertahun-tahun. Perempuan memberikan kesaksian mengenai dampak nyata kerusakan lingkungan seperti pencemaran air dan hilangnya hasil perkebunan rakyat, yang menjadi pertimbangan krusial bagi hakim dalam membantalkan izin tambang.

## Perempuan Menjaga Nafas Terakhir Wawonii

Kisah perempuan Wawonii adalah pengingat bagi dunia bahwa transisi energi menuju “ekonomi hijau” (melalui nikel untuk baterai kendaraan listrik) tidak boleh dibayar dengan darah dan air mata masyarakat lokal di pulau-pulau kecil. Tidak ada “hijau” dalam energi yang dihasilkan dari penghancuran ekosistem pulau yang rentan dan pengabaian hak-hak perempuan.

Perjuangan perempuan Wawonii adalah perjuangan untuk kehidupan. Mereka melawan bukan karena benci pada kemajuan, melainkan karena cinta pada tanah air yang memberi mereka makan. Di tengah ambisi hilirisasi nikel global untuk kendaraan listrik, pada perempuan ini mengingatkan dunia bahwa tidak ada yang benar-benar “bersih” jika proses mengorbankan hak-hak perempuan dan menghancurkan ekosistem pulau kecil yang tak tergantikan.

Bagi mereka, Wawonii adalah harga mati. Suara-suara mereka, meski seringkali direndam oleh mesin tambang, tetapi bergema sebagai pengingat akan pentingnya keadilan ekologis.

\*\*\*



Dok: Mongabay



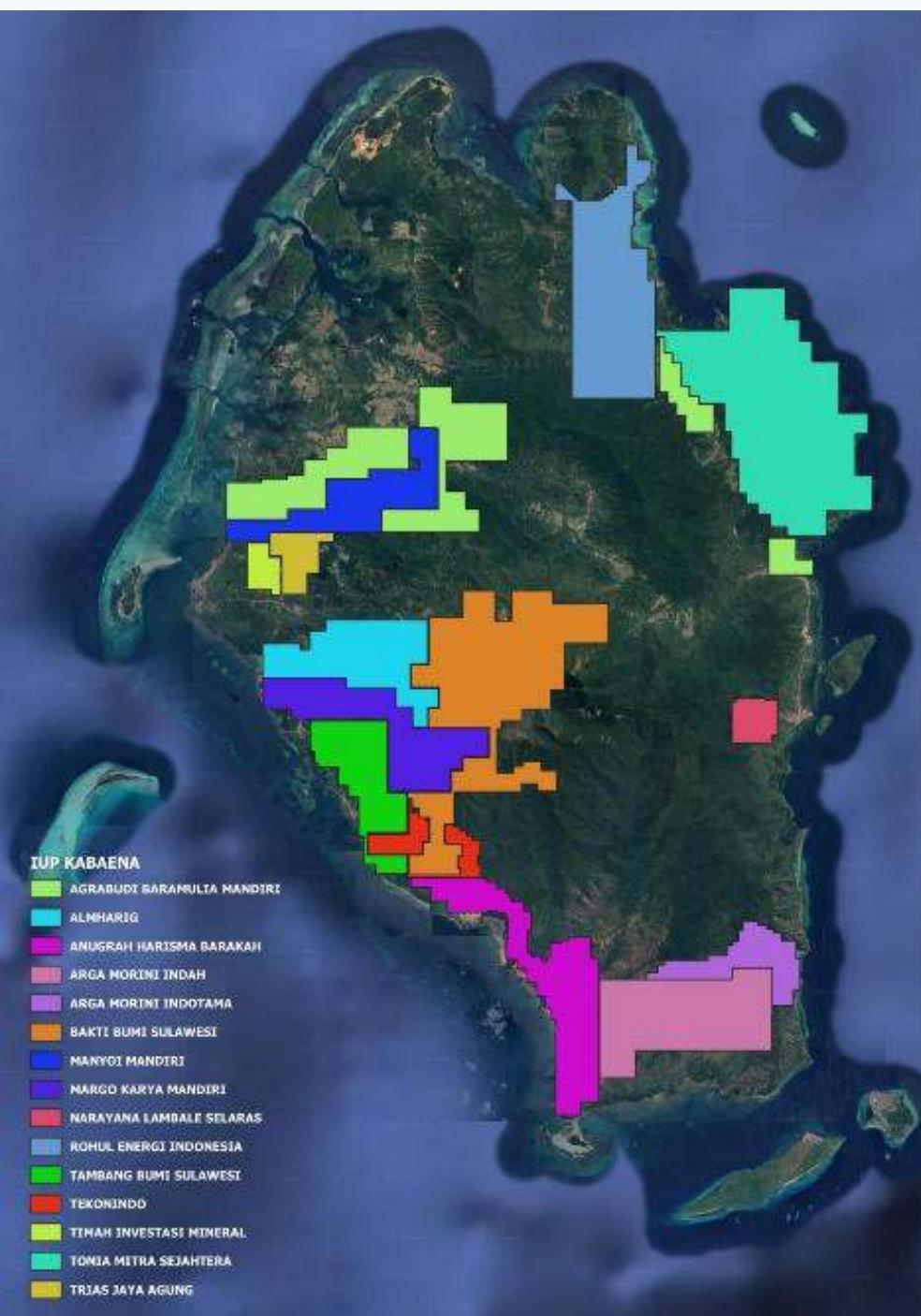
Catatan Akhir Tahun 2025

*Regional Sulawesi*

# *Luka Ekologis* Perempuan Kabaena dari Hulu Hingga ke Hilir

Penulis: Fitra Wahyuni

Di negara Dunia Ketiga seperti Indonesia, kolonialisme telah berganti rupa menjadi kekuasaan korporasi. Atas nama pembangunan maskulin, alam dan tubuh perempuan diposisikan sebagai objek yang sah untuk dikorbankan demi ekstraksi. Namun, di Desa Tirongkotua, Pulau Kabaena, narasi penaklukan ini membentur tembok kokoh: perlawanan perempuan.



sumber: Istimewa

Melalui sosok Ibu Harsina (51), kita melihat bagaimana ingatan bertransformasi menjadi barikade terakhir melawan ekspansi nikel. Ketika regulasi negara memangkas fungsi hutan menjadi sekadar koordinat konsesi, perempuan Kabaena ini justru memperluas makna hutan melalui praktik merawat yang tak henti. Perlawanannya adalah politik keseharian ia menjaga mata air dan menyemai benih bukan hanya untuk urusan dapur, melainkan untuk menegaskan bahwa ada hak hidup yang tidak tunduk pada logika pasar dan tidak bisa dibeli dengan rupiah investasi. Melawan Hilangnya Memori dan Daulat Pangang

Gema perlawanan perempuan Kabaena lahir dan berakar dari Desa Tirongkotua, Kecamatan Kabaena Selatan. Wilayah ini berdiri sebagai anomali sekaligus satu-satunya garis pertahanan yang masih terjaga, menolak untuk ditundukkan oleh ruparupa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah melubangi hampir seluruh tubuh pulau.

Pelanggaran Konstitusi secara terang-terangan pun terjadi berdasarkan UU No. 1 / 2014, Pulau Kabaena dikategorikan sebagai pulau kecil dengan luas hanya sekitar 837 km hingga 891 jauh di bawah ambang batas 2.000 yang diizinkan untuk aktivitas pertambangan.

Meski secara hukum dilindungi, nyatanya Kabaena kini disesaki oleh ekspansi nikel yang mencakup luas sekitar 73 persen atau 650 km<sup>2</sup> dari 891 km<sup>2</sup> total luas Kabaena. Berdasarkan peta konsesi pertambangan diatas dapat diketahui bahwa pulau kecil Kabaena kini di rongrong oleh 15 IUP Perusahaan pertambangan nikel.

Di balik angka-angka konsesi yang menyesakkan dan kepungan 15 perusahaan tambang nikel tersebut, tersimpan luka yang mendalam pada tubuh dan ruang hidup perempuan Kabaena. Namun, kepungan ini tidak lantas membuat mereka menyerah. Di tengah rongsokan alat berat dan hancurnya bentang alam, perempuan-perempuan di Desa Tirongkotua Kec. Kabaena Selatan memilih jalan perlawanan sebuah rutinitas keseharian untuk menjaga apa yang tersisa dari martabat dan masa depan mereka.

Ibu Harsina tidak tinggal diam saat padi yang merupakan simbol identitas Kabaena (Ko pae no atau daerah penghasil beras) perlahan lenyap dari ladangnya. Baginya, kehilangan padi adalah kehilangan jati diri. Ia secara aktif melawan kemiskinan struktural yang dipicu oleh kerusakan ekosistem tambang dengan beralih menanam jagung dan cengkeh.

“Sekarang sudah hampir tidak ada lagi yang menanam padi di sini,” kata Ibu Harsina. “Kami dihantui gagal panen. Jadi lebih aman menanam jagung saja.” Tutur Ibu Harsina

“Kami mulai menyadari adanya perubahan di tanah kami sekitar sepuluh tahun lalu. Hama seperti tikus dan burung mulai menyerang lahan padi. Padahal, dahulu petani di Kabaena tidak pernah sekalipun merasakan gagal panen saat menanam padi,” lanjut Ibu Harsina dengan tatapan mata kosong.

Kerusakan ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Aktivitas pertambangan yang merusak hutan telah memutus rantai ekosistem yang selama ini menjaga keseimbangan alam di Kabaena. Hutan yang dahulu menjadi sumber pangan dan habitat alami bagi hewan-hewan seperti tikus dan burung kini semakin menyempit. Kehilangan ruang hidup dan sumber makanan memaksa mereka turun ke lahan pertanian warga. Akibatnya, sawah yang selama puluhan tahun menjadi penopang hidup petani justru berubah menjadi sasaran serangan hama, menandai runtuhnya keseimbangan ekologis yang dulu terjaga.



Ket: (1) Bukaan Lahan PT TMS di area Hutan Lindung/Source: Satya Bumi. (2) Area Konsesi PT Tomia Mitra Sejahtera (Gambar kiri) /Walhi Sultra

Secara linear rusaknya keseimbangan ekosistem ini juga menghantarkan Kabaena dalam Deforestasi massif. Data pemantauan deforestasi pada wilayah konsesi di Kabaena menunjukkan bahwa dalam kurun waktu dua dekade terakhir, hutan-hutan pulau kecil ini mengalami kehilangan tutupan yang signifikan. Berdasarkan analisis GLAD Alerts (2001–2022) dan RADD Alerts (2020–2023), total deforestasi yang teridentifikasi di dalam wilayah konsesi mencapai 3.374,77 hektare.

Angka ini sangat besar jika diletakkan dalam konteks pulau kecil dengan luas terbatas dan daya dukung ekologis yang rapuh. Jika diterjemahkan ke dalam skala ruang yang lebih mudah dibayangkan, luasan hutan yang hilang ini setara dengan sekitar 4.700 lapangan sepak bola (dengan asumsi satu lapangan  $\pm 0,714$  ha) atau hampir empat kali luas Kecamatan Kabaena Selatan yang menjadi ruang hidup ribuan warga.

## Perempuan dan Perjuangan menjaga Sumpah Leluhur

Suara perlawanan Harsina, ibu dari empat orang anak, memang tidak lantang jika diperhadapkan dengan sistem yang dikuasai para elite. Namun, bersama Komunitas Perempuan Petani Desa Tirongkotua, perlawanan itu menemukan puncaknya pada komitmen kolektif untuk melindungi Gunung Batu Sangia.

Bagi Harsina dan para ibu-ibu Petani di desa Tirongkotua menganggap Batu Sangia bukan sekadar batuan karst yang menjulang 1.100 meter di atas permukaan laut. Lebih dari itu Batu Sangia dipercaya sebagai penjaga spiritual, ruang hidup, sekaligus penyangga ekosistem yang diwariskan dan dilindungi oleh sumpah leluhur. “Siapa yang berani merusak Batu Sangia, biarlah desanya musnah dilalap api.” Ungkap Ibu Harsina

Ibu Harsina mungkin bukan tokoh adat resmi, tetapi suaranya telah menjelma menjadi hukum yang tak bisa ditawar. Ia mengorganisir para Perempuan petani di desanya, memastikan suara perempuan tidak lagi tenggelam dalam musyawarah yang selama ini dikuasai oleh laki-laki dan kepentingan modal. Dengan keteguhan yang lahir dari pengalaman hidup, ia menepis janji manis investasi dan lapangan kerja melalui logika keberlanjutan yang sederhana namun menghantam,

***“Kalau hutan rusak, mau makan apa?.***

Dalam situasi ketika hukum formal kerap berpihak pada kekuasaan, Harsina menjadikan tubuh dan suaranya sendiri sebagai garis merah terakhir batas yang tidak boleh dilampaui oleh korporasi mana pun. Alhasil, melalui perjuangan yang tak henti-henti di ruang-ruang desa dari musyawarah hingga barisan tubuh di garis depan wilayah Batu Sangia hingga kini masih bertahan dari jahatnya tangan-tangan pemodal yang mengincar dan menggerogoti ruang hidup mereka.

***“Kami hanya bisa melakukan ini saja, kalau melakukan demo ibu-ibu disini masih takut, tapi kalau menyangkut Batu sangia jangan coba-coba, satu desa ini pun mengerti apa akibatnya” tutup Ibu Harsina***

Namun disisi lain, suara perlawanan ini masih terkungkung dalam batas-batas wilayahnya sendiri bersifat sektoral dan terisolasi belum mampu menjalar ke setiap inci Pulau Kabaena yang rapuh dan terus berada dalam kepungan kepentingan industri ekstraktif.

Di tengah keterbatasan dan ancaman yang terus membayangi ruang hidup mereka, perempuan-perempuan Tirongkotua merawat bentuk perlawanan yang sunyi namun berkelanjutan dengan menyediakan sebuah dapur raksasa yang tak pernah dibiarkan kehabisan stok.

***“Dulu jahe itu tidak perlu kami tanam secara khusus, karena di hutan kami tumbuh di mana-mana. Begitu juga dengan kunyit,” kenang Ibu Harsina.***

***“Sekarang, kalau kami temukan di hutan, kami ambil dan tanam sendiri di halaman rumah, karena sudah sangat langka.”***

Cerita itu menandai arah yang berbalik. Jahe tak lagi mudah dijumpai, kunyit menjadi tanaman yang harus dijaga keberadaannya. Jika suatu hari warga menemukannya di hutan, mereka tak lagi sekadar memanen. Dengan tangan-tangan perempuan, tanaman itu digali perlahan, dipindahkan, dibawa pulang, lalu ditanam ulang di pekarangan rumah. Sebuah tindakan yang tampak sederhana, namun menyimpan kecemasan yang besar, ketakutan akan kehilangan sepenuhnya sumber pangan dan pengetahuan yang diwariskan lintas generasi.

Hal kecil yang bagi sebagian orang mungkin tak berarti tetapi bagi mereka, ini adalah bentuk perlawanan ekologis yang nyata. Mereka menyelamatkan benih, merawat ingatan kolektif, dan menjaga keberlanjutan hidup dari ruang paling dekat dengan tubuh mereka dapur dan pekarangan.

Ibu Harsina menegakkan perlawanan dari ruang-ruang yang kerap dianggap remeh. Ia mengorganisir perempuan-perempuan petani, memastikan suara mereka hadir dan diperhitungkan dalam rapat-rapat desa yang selama ini lebih akrab dengan bahasa kekuasaan laki-laki dan modal. Namun perjuangannya tidak berhenti pada keberanian bersuara. Di tubuh dan tangan Harsina, jiwa pemelihara perempuan menjelma menjadi dapur raksasa—ruang hidup tempat benih-benih tanaman tradisional dirawat, diselamatkan, dan diwariskan sebagai bentuk perlawanan yang sunyi namun berumur panjang.

Dari wilayah hulu, Harsina menahan laju kehancuran dengan cara yang paling tegas, menolak kehadiran izin usaha pertambangan di benteng terakhir kehidupan mereka. Gunung Batu Sangia bukan sekadar lanskap, melainkan penyangga ekosistem, penjaga mata air, dan sumpah leluhur yang tidak boleh dinegosiasikan. Di sanalah perlawanan perempuan Kabaena berdiri kokoh bukan dengan senjata, tetapi dengan tubuh, ingatan, dan keberanian untuk berkata tidak pada kekuasaan yang hendak menghapus masa depan.

## Hilir: Ketika Tambang Menenggelamkan Ruang Hidup Perempuan Suku Bajo

Dampak aktivitas pertambangan di wilayah hulu Pulau Kabaena menjalar hingga ke bagian hilir, menghantam ruang hidup yang paling rentan. Permukiman perempuan Suku Bajo di Desa Baliara, Kecamatan Kabaena Barat, kini berada di ambang kepunahan. Laut yang selama ini menjadi sumber penghidupan ratusan kepala keluarga tak lagi aman dan layak. Sedimentasi dari aktivitas pertambangan mengalir tanpa kendali, mencampur air laut dengan lumpur, mengubah warna perairan, dan merusak ekosistem pesisir.

Kondisi ini benar memiskinkan, tetapi ironinya juga sangat mematikan. Dalam beberapa peristiwa, laut yang tercemar telah merenggut nyawa anak-anak Suku Bajo korban paling tak berdaya dari kerusakan yang mereka tidak ciptakan. Ironis dan tragis, Suku Bajo yang selama berabad-abad dikenal sebagai pelaut ulung, penjaga laut, kini dipaksa meninggalkan identitas dan mata pencaharian mereka karena laut yang telah dirusak dan dicemari oleh kepentingan.

Kenyataan ini menyisakan keresahan mendalam bagi Ibu Risna (54), perempuan Suku Bajo yang setiap hari hidup dengan kecemasan akan keselamatan anaknya yang baru berusia lima tahun. Anak-anak Suku Bajo kini tak lagi bisa menikmati laut ibu kehidupan bagi komunitas mereka. Perairan yang tercemar limbah berbahaya berubah keruh kecoklatan, menjauhkan generasi muda dari laut yang dahulu jernih dan aman. Mereka tumbuh tanpa mengenal rasa berenang di air yang bersih, tanpa kedekatan dengan ruang hidup yang seharusnya membesar mereka.



Gambar : Air pasang dan air surut di Perkampungan Suku Bajo Kabaena Barat/Walhi Sultra

*"Air laut ini adalah obat bagi kami suku Bajo, dulu kalau sakit gigi, atau gatal-gatal tinggal turun di laut saja langsung sembuh, tapi sekarang sudah tidak berani kami sentuh air, karena sudah berubah warna dan berbau aneh, anak-anak saya gatal-gatal kalau kena air laut sampai sekarang juga masih belum sembuh gatal-gatal ini". Ucap Ibu Risna*

Ketika air laut berubah warna, berbau, dan tak lagi aman disentuh, yang hilang bukan hanya fungsi ekologisnya, tetapi juga sistem kesehatan tradisional komunitas. Anak-anak yang mengalami gatal-gatal berkepanjangan setelah bersentuhan dengan air laut menunjukkan bahwa pencemaran telah memasuki ranah paling intim: tubuh. Dalam konteks ini, kerusakan laut akibat limbah industri tidak hanya melanggar hak atas lingkungan hidup yang sehat, tetapi juga merampas hak masyarakat adat Suku Bajo atas praktik pengobatan tradisional dan pengetahuan leluhur mereka. Bencana industri pertambangan ini tidak hanya merampas ruang hidup, tetapi juga mencabut adat, pengetahuan, dan kebudayaan Suku Bajo secara perlahan.

Di tengah ketakutan itu, Ibu Risna mulai membangun perlawanan. Ia membuka ruang-ruang diskusi kecil, mengumpulkan suara-suara minor perempuan yang selama ini terpinggirkan, dan mengorganisir perempuan Suku Bajo lainnya untuk berani bersuara dan bertindak. Dari kegelisahan seorang ibu, tumbuh upaya kolektif untuk menyelamatkan Pulau Kabaena sebelum kerusakan benar-benar menjadi tak terpulihkan.



Gambar : Ruang – ruang diskusi Perempuan Suku Bajo/Walhi Sultra

Pada Agustus 2025, untuk pertama kalinya dalam sejarah, masyarakat Suku Bajo menyatakan protes terbuka atas rusaknya ruang hidup mereka. Di tengah ketakutan dan keterisolasi, Ibu Risna seorang perempuan penggerak komunitas Suku Bajo di Pulau Kabaena memulai perlawanan dari langkah yang paling sunyi namun berani: mendatangi rumah ke rumah, membuka ruang diskusi, dan meyakinkan sesama perempuan bahwa suara mereka layak didengar. Ia menyampaikan satu pesan yang sama berulang kali: kehidupan mereka sedang berada di ujung tanduk, dan diam bukan lagi pilihan.

Upaya ini perlahan membawa hasil. Puluhan ibu-ibu Suku Bajo akhirnya turun bersama, melakukan aksi di atas jembatan-jembatan kayu yang menghubungkan rumah-rumah panggung mereka—ruang hidup yang kini terancam hilang. Dari tempat itulah mereka menyuarakan tuntutan: perlindungan atas laut, ruang hidup, dan masa depan anak-anak mereka dari ekspansi industri pertambangan nikel di pulau kecil ini.



Gambar : Aksi Penyelamatan Pesisir & Pulau Kabaena/ Credit: Satya Bumi

Aksi tersebut tidak berhenti sebagai peristiwa lokal. Dokumentasi perjuangan perempuan Suku Bajo kemudian dibawa melampaui batas pulau, menjadi bagian dari suara global yang disampaikan dalam forum COP 30 di Belém, Brasil. Dari jembatan rumah panggung di Kabaena hingga panggung diplomasi iklim dunia, perempuan Suku Bajo menegaskan bahwa krisis iklim dan kerusakan lingkungan selalu berkelindan dengan perampasan ruang hidup masyarakat adat dan pulau-pulau kecil.

## **Dari Gunung ke Laut, Tubuh Perempuan sebagai Garis Pertahanan Terakhir.**

Di Pulau Kabaena, perjuangan perempuan tidak bergerak dari satu titik, melainkan mengalir mengikuti tubuh pulau itu sendiri dari hulu gunung hingga hilir laut. Di kaki Gunung Batu Sangia, perempuan seperti Ibu Harsina menjaga hutan sebagai sumber air, pangan, dan ingatan leluhur. Sementara di pesisir Baliara, perempuan Suku Bajo seperti Ibu Risna mempertahankan laut sebagai ruang hidup, ruang penyembuhan, dan masa depan anak-anak mereka. Keduanya terhubung oleh satu kenyataan yang sama: ketika industri tambang merangsek, perempuanlah yang pertama kali merasakan dampaknya, dan perempuan pula yang memilih berdiri paling awal untuk melawan.

Perlawanannya ini tidak selalu hadir dalam bentuk teriakan atau benturan keras. Ia tumbuh dari dapur, dari kebun, dari ruang diskusi kecil, dari langkah kaki yang mendatangi rumah ke rumah, dari tubuh yang menolak tunduk ketika ruang hidup hendak dirampas. Di hulu, perempuan menjaga gunung agar air tetap mengalir. Di hilir, perempuan menjaga laut agar kehidupan tetap berdenyut. Mereka menolak dipisahkan dari alam karena bagi perempuan Kabaena, alam bukan sekadar sumber daya, melainkan perpanjangan dari tubuh dan kehidupan itu sendiri.

\*\*\*



Dok: Benua Indonesia

Catatan Akhir Tahun 2025

Regional Sulawesi

# Perempuan Sebagai Penyangga Kehidupan di Bawah Khaki Hutan Nantu

Penulis: Kusmawaty Matara

## Ketika Hutan Bukan Sekadar Ruang, Melainkan Cara Hidup

Desa Pangahu, sebuah titik kecil di peta Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, kerap tampak sunyi bagi siapa pun yang hanya melintas atau memandangnya dari kejauhan. Jalan desa yang sederhana dan rumah-rumah yang berjejer rapi memberi kesan tenang, seolah waktu berjalan lebih lambat. Namun bagi mereka yang tinggal dan hidup di sana, Pangahu adalah desa yang berdenut, bergerak mengikuti ritme alam dan hutan yang mengelilinginya. Lebih dari 80 persen wilayah desa ini berada di dalam kawasan hutan lindung Suaka Margasatwa (SM) Nantu, menjadikan hutan hadir sangat dekat dengan kehidupan warga. Setiap perubahan musim, aliran sungai, dan kondisi ladang selalu dikaitkan dengan keadaan hutan. Karena itu, bagi warga Pangahu, hutan bukan sekadar latar hijau atau batas administratif negara. Ia adalah sumber kehidupan, sekolah alam tempat belajar membaca tanda-tanda alam, sekaligus ruang spiritual yang membentuk cara hidup dan nilai-nilai keseharian masyarakat.



Desa Pangahu, Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, dikelilingi kawasan hutan Suaka Margasatwa Nantu.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gorontalo 2024 mencatat jumlah penduduk Desa Pangahu sekitar 1.416 jiwa pada tahun 2024 dengan komposisi penduduk laki-laki dan perempuan yang relatif seimbang. Warga tersebar di enam dusun yang membentuk satu kesatuan sosial desa. Salah satunya adalah Dusun Buyuo, wilayah yang berbatasan langsung dengan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Gorontalo. Kedekatan ini membuat aktivitas warga Dusun Buyuo sangat bergantung pada kondisi hutan di sekitarnya. Dari total 56 kepala keluarga yang memiliki lahan bersinggungan langsung dengan kawasan hutan, sebanyak 48 kepala keluarga merupakan warga Dusun Buyuo. Situasi ini menjadikan hutan bukan sekadar latar geografis, melainkan bagian dari ruang hidup sehari-hari. Relasi warga dengan hutan terjalin sangat intens, membentuk pola pengelolaan lahan, mata pencaharian, hingga nilai-nilai sosial yang diwariskan antar generasi.



Pembuatan persemaian sementara di lahan warga

Sebagian besar wilayah Desa Pangahu hingga kini masih tertutup oleh hutan alam. Analisis tutupan lahan tahun 2022 menunjukkan bahwa kawasan berhutan di desa ini mencapai lebih dari 16.000 hektar atau sekitar 83 persen dari total luas wilayah, dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kawasan Suaka Margasatwa Nantu yang memiliki fungsi ekologis sangat penting. Dari bentang alam inilah mengalir Sungai Hutadelita dan Sungai Tombiu, dua sungai utama yang melintasi desa dan menjadi sumber air bagi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan peternakan warga, yang keberlangsungannya sangat bergantung pada kondisi hutan di bagian hulu. Di tengah dominasi hutan tersebut, praktik-praktik konservasi berlangsung secara alami dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana tampak

pada persemaian sementara di lahan milik warga. Bibit pohon buah dan kayu ditanam secara swadaya, tidak hanya untuk kepentingan ekonomi, tetapi juga sebagai penanda batas lahan, penahan erosi, serta tabungan ekologis jangka panjang bagi generasi mendatang. Praktik ini menunjukkan bahwa bagi warga Pangahu khususnya perempuan yang terlibat aktif di dalamnya bertani dan merawat hutan bukanlah dua aktivitas yang terpisah, melainkan satu kesatuan cara hidup yang menopang keberlanjutan alam sekaligus penghidupan mereka.

# Kerja Sunyi Perempuan: Pengetahuan Lokal yang Menjaga Masa Depan Hutan



Perempuan Pangahu memegang pengetahuan kunci dalam produksi pangan dan pengelolaan lahan.

Di tengah lanskap alam yang kuat inilah kehidupan agraris warga Pangahu berlangsung dan bertahan dari generasi ke generasi. Mayoritas penduduk menggantungkan hidup pada pertanian lahan kering yang sangat bergantung pada kondisi alam dan cuaca. Jagung dan padi gogo menjadi pangan pokok, ditanam dengan mengikuti siklus musim yang dibaca dari tanda-tanda alam, seperti perubahan angin, curah hujan, dan kondisi tanah. Di sela tanaman utama tersebut, warga menanam kacang tanah, aneka sayuran, serta buah-buahan seperti jeruk dan jambu kristal. Dalam beberapa tahun terakhir, buah naga mulai diusahakan karena dinilai memiliki nilai jual lebih baik. Selain tanaman pangan, kelapa masih menjadi komoditas perkebunan yang paling dominan dan tersebar luas. Sementara itu, kakao hanya diusahakan oleh sebagian kecil warga karena keterbatasan lahan dan perawatan yang relatif lebih rumit.

Di balik aktivitas pertanian yang tampak sederhana, perempuan Pangahu memegang peran yang sangat menentukan namun kerap luput dari sorotan. Mereka terlibat aktif di hampir seluruh tahapan produksi, mulai dari menanam benih, merawat tanaman dari hama dan kekeringan, membungkus buah agar kualitasnya terjaga, hingga memanen dan memilah hasil terbaik menjadikan kehadiran mereka bukan sekadar pelengkap, melainkan inti dari keberhasilan pertanian keluarga. Ainari Nasir, yang akrab disapa Ma Nari, menjadi salah satu contoh nyata bagaimana pengetahuan perempuan menopang keberlanjutan hidup desa. Ia melakukan pembibitan kakao secara mandiri dan menanam jagung tanpa pupuk kimia, hanya mengandalkan air serta kesuburan alami tanah. Praktik ini bukan sekadar kebiasaan turun-temurun, melainkan hasil dari pengalaman panjang yang diwariskan lintas generasi dan terbukti menjaga produktivitas lahan tanpa merusak ekosistem. Dari ladang-ladang inilah perempuan Pangahu menunjukkan bahwa bertani bukan hanya soal menghasilkan pangan, tetapi juga tentang merawat tanah, menjaga keseimbangan alam, dan memastikan kehidupan tetap berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Peran perempuan tidak berhenti ketika mereka pulang ke rumah; justru di ruang domestik, tanggung jawab mereka semakin kompleks dan menentukan keberlangsungan hidup keluarga. Mereka mengatur pangan keluarga dengan cermat, menyimpan jagung, padi, dan hasil kebun lainnya secara tradisional agar tahan lama dan tetap bernutrisi. Setiap persediaan dihitung teliti untuk memastikan cukup hingga musim panen berikutnya. Lebih dari itu, perempuan membuat keputusan strategis tentang hasil panen: mana yang dikonsumsi, mana yang dijual sebagai sumber pendapatan tambahan, dan bagaimana mengelolanya agar ekonomi keluarga tetap stabil. Keputusan-keputusan ini tidak hanya menjaga ketahanan pangan, tetapi juga memperkuat fondasi ekonomi keluarga dan kesejahteraan jangka panjang.

"Kalau perempuan tidak ikut, rumah tangga tidak bisa berjalan, ladang tidak terurus," ujar seorang ibu petani Pangahu dengan nada tegas namun sederhana. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, ia sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan anak-anak, lalu berganti peran membawa alat dan bekal seadanya ke ladang bersama anggota keluarga lainnya. Rutinitas ini dijalani hampir setiap hari tanpa keluhan. Bagi perempuan Pangahu, kerja domestik dan kerja produksi bukan dua dunia terpisah; keduanya menyatu dalam ritme hidup yang saling menopang. Mengurus rumah berarti memastikan tenaga keluarga siap bekerja, sementara mengolah ladang menjaga dapur tetap berasap. Dalam keseharian itulah perempuan menjadi penghubung antara kebutuhan keluarga dan keberlanjutan penghidupan, meski peran mereka jarang disorot secara formal.

Pagi di Pangahu selalu dimulai dengan ritme yang hampir seragam, menandai hari panjang warga desa. Asap tipis mengepul dari dapur kayu, membawa aroma sarapan sederhana yang menjadi energi pertama bagi seluruh keluarga. Suara alat pertanian cangkul hingga sabit bersahutan di udara sejuk. Langkah-langkah perempuan menyusuri jalan tanah menuju ladang menjadi pemandangan akrab, membawa bekal sederhana dan alat kerja untuk sehari penuh. Namun yang paling penting adalah pengetahuan yang mereka bawa, bukan yang tertulis di buku, melainkan pengalaman panjang dan warisan dari generasi ke generasi. Pengetahuan ini membimbing mereka menanam, merawat tanaman, membaca tanda-tanda alam, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan alam. Di sinilah kehidupan Pangahu dan hubungan manusia dengan hutan terasa nyata dan berkesinambungan.

Di Pangahu, kerja perempuan jauh lebih dari sekadar pelengkap dalam rumah tangga atau pertanian. Peran mereka menjadi inti ketahanan pangan keluarga, menegaskan pentingnya kontribusi perempuan dalam menjaga keberlangsungan hidup desa. Dengan keterampilan yang tampak sederhana, memilih benih berkualitas, menyimpan hasil panen agar tahan lama, mengatur waktu tanam sesuai musim dan kondisi alam perempuan memastikan dapur tetap mengepul dan keluarga tidak kekurangan pangan. Lebih dari itu, mereka menjaga keseimbangan ekosistem sekitar, memahami batas antara mengambil sumber daya dan merawatnya agar tetap lestari. Pengetahuan ini diwariskan turun temurun dan menjadi fondasi pengelolaan lahan berkelanjutan. Dengan cara itu, perempuan Pangahu menegaskan bahwa keberlanjutan hidup bukan hanya soal produksi hari ini, tetapi juga menjaga harapan dan sumber daya bagi generasi esok.

## Pengetahuan Lokal Perempuan dan Masa Depan Hutan Nantu

Relasi perempuan Pangahu dengan hutan terjalin secara alami dan mendalam, sejak mereka masih anak-anak. Sejak kecil, anak-anak perempuan terbiasa mengikuti ibu mereka ke kebun dan ke pinggir hutan, menyusuri jalan setapak yang telah dikenali turun-temurun. Dari pengalaman itu, mereka belajar mengenali jenis pohon yang aman untuk diambil kayunya dan mana yang harus dibiarkan tumbuh agar hutan tetap lestari. Mereka juga diajari membaca tanda-tanda alam melihat warna dan tekstur tanah untuk menilai kesuburnannya, memantau perubahan aliran air sungai, hingga mengenali gejala alam yang menandai pergeseran musim. Pengetahuan ini bukan sekedar teori, tetapi praktik hidup yang membentuk cara pandang terhadap alam. Dengan memahami pola dan ritme alam, perempuan Pangahu mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian hutan, menjadikan hutan sebagai ruang belajar sekaligus penopang kehidupan sehari-hari.



Pondok Manari, ruang kerja, istirahat, dan transfer pengetahuan antar generasi.

Pondok Manari berdiri sederhana di tengah kebun, namun kehadirannya menyimpan makna yang jauh melampaui bentuk fisiknya. Pondok ini menjadi saksi bisu kerja panjang perempuan Pangahu yang setiap hari mengolah ladang, merawat tanaman, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan hidup dan kelestarian alam. Di tempat inilah mereka beristirahat sejenak dari terik matahari, berbagi cerita tentang musim, hasil panen, dan pengalaman hidup, sekaligus mewariskan pengetahuan kepada anak-anak yang ikut ke ladang. Pondok Manari berfungsi sebagai ruang belajar alam, tempat nilai-nilai kehati-hatian terhadap hutan, tanah, dan air ditanamkan sejak dini melalui praktik langsung. Dari ruang sederhana ini, relasi manusia dan alam terus dirajut secara perlahan namun konsisten, membentuk cara hidup yang menghormati alam sebagai penyangga kehidupan.

Pada praktik sehari-hari, perempuan Pangahu menjalankan pengelolaan sumber daya alam dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran ekologis. Mereka memilih kayu bakar dari ranting kering atau pohon yang sudah tua, menghindari penebangan pohon muda atau pohon penting yang dapat merusak keseimbangan hutan. Di lahan pertanian, mereka menanam tanaman pangan pada tempat yang tepat, mempertimbangkan kondisi tanah agar tetap subur dan tidak cepat terkikis. Kebun mereka dikelola secara campuran, menanam berbagai jenis tanaman berdampingan sehingga tercipta ekosistem mikro yang saling mendukung. Pola tanam ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menjaga kesuburan tanah, mencegah erosi, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Meski tampak sederhana, praktik-praktik ini merupakan bentuk konservasi nyata yang berlangsung setiap hari, menunjukkan bagaimana kehidupan manusia dan hutan bisa saling menopang secara berkelanjutan.

Dampak pengelolaan hutan yang dilakukan perempuan Pangahu terasa nyata dan langsung bagi kehidupan desa. Hutan tetap berdiri sebagai penyangga ekosistem, menjaga keseimbangan alam, sekaligus menjadi sumber air bersih yang mengalir ke ladang-ladang dan permukiman. Produktivitas ladang tetap terjaga tanpa ketergantungan berlebihan pada pupuk kimia, mencerminkan praktik pertanian yang berkelanjutan. Keberadaan Hutan Suaka Margasatwa (SM) Nantu menjadi sangat penting karena juga merupakan habitat bagi berbagai flora dan fauna yang dilindungi. Beberapa di antaranya tercatat dalam daftar IUCN dan CITES, termasuk pakis haji (*Cycas rumphii*), daun woka (*Livistonia rotundifolia*), serta satwa khas Sulawesi seperti babi rusa, anoa, monyet hitam Sulawesi, tarsius, kuskus Sulawesi, dan puluhan jenis burung endemik. Kehadiran spesies ini menegaskan bahwa pengelolaan hutan yang bijaksana bukan hanya soal manusia, tetapi juga menjaga kehidupan seluruh makhluk yang bergantung pada ekosistem tersebut.

Kontribusi perempuan dalam menjaga hutan dan menopang kehidupan desa kerap diabaikan dalam perencanaan pembangunan dan program konservasi. Pembangunan sering hanya diukur dari angka luas lahan yang direhabilitasi, jumlah pohon yang ditanam, atau persentase tutupan hutan tanpa mempertimbangkan pengalaman lokal, kearifan, dan peran perempuan yang merawat hutan setiap hari. Akibatnya, hutan yang terjaga rentan dipandang sebagai ruang “kosong,” siap dimanfaatkan untuk pembukaan jalan, perkebunan, atau proyek ekonomi berskala besar yang mengancam fungsi ruang hidup warga. Pengetahuan perempuan, hasil pengalaman panjang dan diwariskan lintas generasi, jarang diakui karena tidak berbentuk teknis atau formal. Padahal, praktik harian mereka memilih benih, menata pola tanam, mengelola lahan campuran, dan menjaga keseimbangan ekosistem menjadi fondasi keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan desa. Mengabaikannya berarti membuka peluang bagi pembangunan yang merusak hutan, sumber air, dan kehidupan masyarakat Pangahu.

Di tengah tekanan perubahan iklim dan tantangan ekonomi yang semakin nyata, pengetahuan lokal yang dimiliki perempuan Pangahu justru menjadi semakin relevan. Ketika pola musim tidak menentu dan ketidakpastian meningkat, pengalaman panjang mereka dalam membaca alam menawarkan strategi bertahan yang lentur dan adaptif. Mengakui peran perempuan bukan sekadar soal keadilan gender, tetapi juga fondasi keberlanjutan desa. Pembangunan yang mengabaikan pengalaman dan pengetahuan lokal berisiko rapuh dan tidak berakar, sementara menghargai serta melibatkan praktik sehari-hari perempuan menjadikan hutan bukan sekadar objek, melainkan bagian hidup yang saling terhubung. Di bawah kaki hutan Nantu, perempuan Pangahu terus bekerja dalam sunyi, menanam, merawat, menyimpan, dan menjaga. Dari tangan-tangan inilah kehidupan desa bertahan, menjaga dapur tetap mengepul dan memastikan keberlanjutan sumber daya bagi generasi hari ini maupun yang akan datang.



# HUTAN SULAWESI

Dok: WALHI Sulawesi



# HUJAN SELATAN

alawesi Selatan

# CATATAN

## *Penutup*

Di seluruh Sulawesi, dari Loeha Raya hingga Wawonii, dari Kabaena sampai kaki hutan Nantu, perempuan menjadi aktor utama dalam mempertahankan hutan hujan sebagai ruang hidup, bukan komoditas. Perlawanannya mereka bukan hanya menolak tambang nikel, perkebunan, dan infrastruktur besar, tetapi juga menolak logika pembangunan ekstraktif yang menggadaikan alam dan tubuh perempuan demi keuntungan korporasi dan narasi “pembangunan” yang androsentrisk.

Di Loeha Raya, perempuan menahan gempuran tambang nikel PT. Vale Indonesia dan menolak militerisasi blok Tanamalia yang menggusur kebun merica mereka. Di Desa Mambu Tapua, perempuan menjadi penjaga hutan dan pengelola sumber daya alam yang menolak dikorbankan demi proyek besar. Di Kabaena, perempuan hidup dengan luka ekologis yang dalam: hutan gundul, sungai tercemar, dan mata pencaharian yang terusik, tetapi tetap berdiri sebagai penjaga ruang hidup. Di Wawonii, perempuan melawan tambang dengan tekad yang sama: menjaga tanah, air, dan masa depan anak-anak mereka. Di bawah kaki hutan Nantu, perempuan menjadi penyangga kehidupan yang menolak diam ketika hutan dan air mulai tergerus.

Di tangan perempuan, kebun merica, cengkeh, kelapa, jambu mete, dan pangan lokal bukan hanya sumber ekonomi, tetapi sistem ekologis yang dijaga dengan pengetahuan turun-temurun. Mereka mengatur air, tanah, dan musim, memastikan dapur tetap menyala di tengah krisis lingkungan. Ketika air tercemar, udara dipenuhi debu, dan tanah rusak oleh tambang dan perkebunan, perempuan pula yang memikul beban terberat: mencari air bersih, merawat keluarga yang sakit, dan mempertahankan pangan sehat dari sisa alam yang masih bertahan.

Namun, perjuangan ini berlangsung dalam lanskap hambatan struktural yang berat. Perempuan kehilangan akses atas tanah, hutan, dan air akibat ekspansi ekstraktif; menghadapi kerentanan ekologis dan sosial yang berlapis; serta terus dimarginalkan dalam pengambilan keputusan yang menentukan masa depan wilayah mereka. Tidak sedikit yang mengalami intimidasi, kriminalisasi, dan kekerasan karena dianggap menghambat pembangunan. Di saat yang sama, ketergantungan ekonomi dan beban kerja domestik yang tinggi semakin menyempitkan ruang aman dan daya tawar mereka.

Pada akhirnya, pertanyaan yang harus diajukan bukan lagi mengapa perempuan melawan, melainkan mengapa negara terus menutup mata terhadap suara mereka. Kisah-kisah dalam tulisan ini menegaskan bahwa perempuan di Sulawesi bukan hanya korban kerusakan hutan hujan, tetapi penjaga terakhir ruang hidup yang menuntut hak atas tanah, air, dan masa depan generasi berikutnya. Perlindungan hutan hujan Sulawesi tidak mungkin dicapai tanpa keadilan ekologis berperspektif gender—tanpa pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan yang selama ini menjaga alam dengan tubuh, kerja, dan keberanian mereka. Catatan penutup ini sekaligus menjadi seruan: menyelamatkan hutan berarti berdiri bersama perempuan penjaganya.

# REFERENSI

Aksi Ekologi & Emansipasi Rakyat (AEER). (n.d.). Dampak Nikel dalam Kehidupan Perempuan di Lingkar Smelter Nikel Morowali. Tersedia di: <https://www.aeer.or.id/dampak-nikel-dalam-kehidupan-perempuan-di-lingkar-smelter-nikel-morowali/>

Asian Muslim Action Network (AMAN Indonesia). (2025, August 29). 14.000+ kasus kekerasan di 2025, sudahkah perempuan merdeka? <https://amanindonesia.org/14-000-kasus-kekerasan-di-2025-sudahkah-perempuan-merdeka/>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur. (2025). Kecamatan Towuti dalam angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur. (dokumen statistik tahunan)  
Hutan Hujan. (n.d.). Perempuan-perempuan Tangguh Sulawesi Menentang Pertambangan Nikel. <https://www.hutanhujan.org/updates/12031/perempuan-perempuan-tangguh-sulawesi-menentang-pertambangan-nikel>

Institut Pertanian Bogor. (2025). Hasil Pengujian Laboratorium Produktivitas dan Lingkungan Perairan. Bogor: IPB.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. (2025). Siaran Pers Komnas Perempuan dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup 2025. Tersedia di: <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-memperingati-hari-lingkungan-hidup-2025>

Magdalene.co. (2023). Dampak Tambang Nikel Raja Ampat terhadap Kehidupan Perempuan. <https://magdalene.co/story/dampak-tambang-nikel-raja-ampat-perempuan/>

Walhi Sulawesi Selatan. (n.d.). Laporan hasil riset: Lumbung merica nusantara di tengah perluasan pertambangan nikel — Etnografi perkebunan & valuasi ekonomi kawasan Tanamalia, Luwu Timur, Sulawesi Selatan. <https://walhisulsel.orid/4133-laporan-hasil-riset-lumbung-merica-nusantara-di-tengah-perluasan-pertambangan-nikel-etnografi-perkebunan-valuasi-ekonomi-kawasan-tanamalia-luwu-timur-sulawesi-selatan/>

# BIODATA

## *Penulis*

**Zulfaningsih HS** lahir di Sinjai. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di tanah kelahirannya. Tahun 2016, ia melanjutkan studi di salah satu perguruan tinggi di Kota Makassar. Sejak bangku kuliah, ia aktif dalam organisasi mahasiswa dan berbagai komunitas sosial. Pascastudi, Zulfaningsih HS memilih jalur pengabdian dengan terlibat sebagai relawan di Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan. Sejak 2021 hingga kini, ia terlibat aktif dalam kerja-kerja advokasi lingkungan, pendampingan komunitas, serta penguatan perspektif kritis atas relasi antara pembangunan, industri ekstraktif, dan hak-hak masyarakat.

**Siti Aminah** lahir di Polman 12 Desember 1965, adalah aktivis WALHI Sulawesi Barat. Sejak tahun 2016 sampai saat ini ikut terlibat aktif melakukan Pendampingan pada Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi Terbatas. Dalam Pendampingan tersebut adalah fokus pada bagaimana menjaga Hutan terutama kawasan yang dilindungi, dari Hasil Pendampingan penulis melihat salah satu Strategi untuk menjaga Kawasan Hutan adalah memperbaiki Tata Kelola Usaha dengan melibatkan perempuan.

**Elsa Ayu Friska** lahir di Kendari, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 12 April 1999. Pada tahun 2024, ia bergabung dengan salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat di Kota Kendari, yaitu LSM Komnasdesa Sultra, dengan peran sebagai Admin dan Finance. Memasuki tahun 2025, Elsa mulai mencoba hal baru dengan terjun langsung ke lapangan untuk memperluas pengalaman melalui kegiatan advokasi dan pendampingan masyarakat. Hingga kini, ia aktif terlibat dalam kerja-kerja advokasi lingkungan, menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

**Fitra Wahyuni** lahir di Lambale, Buton Utara pada 12 Januari 1996, adalah aktivis lingkungan WALHI Sulawesi Tenggara sejak tahun 2021, dengan fokus pada krisis ekologis di pulau-pulau kecil dan dampaknya terhadap perempuan. Ia terlibat langsung dalam pendampingan komunitas terdampak pertambangan di Kabaena, mendokumentasikan bagaimana tubuh perempuan, ingatan ekologis, dan pengetahuan lokal tergerus oleh ekspansi industri ekstraktif. Melalui perspektif ekofeminis, Fitra menulis dengan memadukan riset lapangan, narasi pengalaman hidup perempuan, dan kritik terhadap relasi kuasa negara & korporasi yang mengobjektifikasi alam. keyakinan bahwa luka ekologis selalu meninggalkan jejak pada tubuh, ruang hidup, dan ingatan kolektif perempuan.

**Kusmawaty Matara** menempuh pendidikan tinggi hingga meraih gelar Doktor. Ia aktif secara akademis dan profesional dalam riset gender, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi Direktur Woman Institute for Research and Empowerment of Gorontalo (WIRE-G), sebuah lembaga riset dan advokasi yang fokus pada isu perempuan, hak anak, dan lingkungan hidup di Provinsi Gorontalo. WIRE-G sendiri bergerak sebagai anggota jaringan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), berkolaborasi dalam berbagai program advokasi lingkungan dan perlindungan hak masyarakat. Kusmawaty juga berkarya dalam bidang akademik; ia tercatat sebagai penulis dan peneliti dalam berbagai publikasi ilmiah, termasuk studi tentang ketahanan komunitas perempuan dalam menghadapi bencana dan psikologi pendidikan.

# Catatan Akhir Tahun 2025

## *Regional Sulawesi*

# Catatan Akhir Tahun 2025

## *Regional Sulawesi*

**“Ragam Perlawanan Perempuan Sulawesi Melindungi dan  
Menjaga Hutan Hujan”**

**Penulis**

Zulfaningsih HS  
Fitra Wahyuni  
Elsa Ayu Friska  
Kusmawaty Matara  
Siti Aminah

**Editor**

Slamet Riadi

**Layout**

Fitra Yusri

**Diterbitkan oleh**

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan  
Jalan Aroepala, Kompleks Permata Hijau Lestari, Blok Q1 No.8, Makassar Indonesia  
+628229 393 9591  
+62411 467 1368  
walhisulsel@gmail.com  
[www.walhisulsel.or.id](http://www.walhisulsel.or.id)